

**SISTEM *GERANG* (GADAI) DALAM PERSPEKTIF ISLAM DI DESA  
DUWANURKECAMATAN ADONARA BARAT  
KABUPATEN FLORES TIMUR**



**Skripsi**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Alauddin Makassar*

Oleh :

**IDA ROHANA**  
**NIM: 90100114119**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

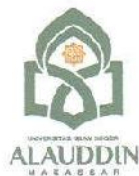
Nama : Ida Rohana  
NIM : 90100114119  
Tempat/Tgl. Lahir : Uwelolu, 13 Januari 1995  
Jur/Prodi : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Alamat : Jl. H.M. Yasin Limpo No.38 Romangpolong, Gowa.  
Judul : Sistem *Gerang* (gadai) Dalam Perspektif Islam di Desa  
Duwanur Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Gowa, 01 November 2018  
Penulis,

**Ida Rohana**  
**NIM: 90100114119**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ☎ (0411) 864924, Fax. 864923  
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo Romang polong Gowa . ☎ 424835, Fax 424836

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skrripsi yang berjudul **"Sistem Gerang (Gadai) Dalam Perspektif Islam di Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur"**, yang disusun oleh **Ida Rohana** , NIM: 90100114119, Mahasiswi Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 23 November 2018, bertepatan dengan 15 Rabiul Awal 1440 H, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Islam.

Samata-Gowa, ..... November 2018

..... 1440 H

**DEWAN PENGUJI**

Ketua : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.  
Sekertaris : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.  
Munaqisy I : Dr. Tahir Maloko, M.Hi.  
Munaqisy II : Ismawati, SE., M.Si.  
Pembimbing I : Dr. Urbanus Uma Leu, M.Ag.  
Pembimbing II : Mustafa Umar, S.Ag., M.Si.

( ..... )  
( ..... )  
( ..... )  
( ..... )  
( ..... )  
( ..... )

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag  
NIP. 19581022 198703 1 002

## KATA PENGANTAR



Puji hanyalah milik Allah swt. Penguasa alam semesta yang dengan rahmat dan rahimnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi yang terakhir Muhammad saw. Para keluarga dan para sahabat beliau, yang dengan perjuangan atas nama Islam hingga dapat kita nikmati sampai saat ini indahnya Islam dan manisnya iman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memahami sehingga persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Islam jurusan Ekonomi Islam di fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda **Sahman** dan Ibunda **Hayati**, yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, dukungan materi dan doa yang selalu dipanjatkan setiap saat untuk penulis dengan tulus dan ikhlas, sehingga penulis bisa menjadi manusia yang berharga dan bermanfaat buat orang lain.

Skripsi ini juga dipersembahkan kepada orang-orang yang saya cintai dan mencintai saya atas kerja keras yang telah diberikan dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab kepada penulis selama ini. Serta saudara-saudariku yang telah banyak berkorban baik tenaga maupun waktu, ilmu dan mengajarkan arti keluarga kepada penulis. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, meringankan azab kubur

kita, menjauhkan ia dari siksa neraka, dan menjadikan kita sebagai sebagai golongan hamba-hamba yang diridhoinya. *Aamiin Ya Robbal Alamin.*

Penyelesaian skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Peneliti banyak menghadapi hambatan , tetapi dengan motivasi dan dukungan dari berbagai pihak peneliti dapat menyelesaikan karya tulis ini. Olehnya itu, peneliti menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada:

1. **Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.** Rektor UIN Alauddin Makassar, beserta **Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag.** Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, **Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A.** Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan dan **Prof. Hj. Siti Aisyah Kara, M.A. Ph.D.** sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan alumni, Serta **Prof. Hamdan Juhannis, M.A. Ph.D.** Kerjasama sebagai Wakil Rektor UIN Alauddin Makassar yang telah menyediakan fasilitas belajar sehingga peneliti dapat mengikuti kuliah dengan baik.
2. **Prof. Dr. Ambo Asse, M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. **Dr. Rahmawati Muin, S.Ag.** selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam yang telah mengizinkan penulis untuk mengangkat skripsi dengan judul Sistem Gerang (Gadai) Dalam Perspektif Islam Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur dan **Drs. Thamrin Logawali, MH.,** selaku Sekertaris Jurusan Ekonomi Islam.

4. **Dr. Urbanus Uma Leu, M.Ag.**, selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan kepada penulis hingga bisa menyusun skripsi ini dan Bapak **Mustofa Umar, S.Ag., M.Ag.** selaku pembimbing II, atas waktu, pikiran, dan kesabaran yang beliau berikan untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat.
6. Seluruh staf akademik, dan tata usaha, serta staf jurusan Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar.
7. Kepala Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timuryang telah memeberi izin penulis untuk melakukan penelitian.
8. Rekan-rekan mahasiswa UIN Alauddin Makassar Khususnya prodi Ekonomi Islam. Terkhusus kepada teman-teman seperjuangan yang telah membantu untuk tetap optimis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dari semua pihak, penulis skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik. Olehnya itu, penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat.

Gowa, 01 November 2018

Penulis

**Ida Rohana**

**NIM : 90100114119**

## DAFTAR I

JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
ABSTRAK .....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat.....	6
D. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	7
E. Kajian Pustaka .....	7
BAB II TINJAUAN TEORETIS	
A. Pengertian Gadai.....	9
B. Dasar Hukum Gadai .....	13
C. Rukun dan Syarat Rahn.....	16
D. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai.....	20
E. Hukum-hukum Gadai dan Dampaknya .....	22
F. Pertambahan Gadai.....	30
G. Berakhirnya Akad Gadai .....	31
H. Kerangka Konseptual .....	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	34
B. Pendekatan Peneletian .....	35
C. Sumber Data .....	36
D. Teknik Pengumpulan Data .....	37

E. Instrumen Penelitian .....	39
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian.....	42
B. Faktor Masyarakat Desa Duwanur Memilih <i>Gerang</i> (gadai).....	47
C. Sistem Pelaksanaan <i>Gerang</i> (Gadai) Yang Terjadi di Desa Duwanur.	49
D. Pandangan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan <i>Gerang</i> (gadai) di Desa Duwanur .....	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	65
B. Implikasi Penelitian.....	66
DAFTAR PUSTAKA .....	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	





## DAFTAR TABEL

- TABEL I** Tabel Batas Wilayah Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores timur Tahun 2018
- TABEL II** Tabel Mata Pencaharian Penduduk Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores timur Tahun 2018
- TABEL III** Tabel Tingkat pendidikan Tahun Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores timur Tahun 2018
- TABEL IV** Tabel Tingkat Agama Tahun Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores timur Tahun 2018
- TABEL V** tabel penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores timur Tahun 2018



## ABSTRAK

**Nama : Ida Rohana**

**Nim : 90100114119**

**Judul : Sistem *Gerang* (Gadai) Dalam Perspektif Islam di Desa Duwanur  
Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur**

---

Peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan secara jelas terkait masalah pelaksanaan *gerang* (gadai) yang terjadi di Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur. Dikaji dan dianalisis dalam perspektif Islam dengan tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong masyarakat memilih *gerang* (gadai), menganalisis bagaimana sistem *gerang* (gadai) yang diterapkan serta bagaimana perspektif Islam terhadap praktik *gerang* (gadai).

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif- kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan suatu keadaan atau fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang menjadi populasi adalah penggadai, penerima gadai, dan masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan transaksi gadai kebun kelapa secara keseluruhan bila dilihat dari rukun dan kewajiban gadai sudah terpenuhi. Akan tetapi, dilihat dari segi sighthat ( penentuan batas waktu) yang tidak ditentukan, sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban gadai dalam perspektif Islam belum terpenuhi sepenuhnya sehingga barang gadai sebagai jaminan disalah artikan dengan memanfaatkan serta memperoleh hasilnya.

***Kata Kunci : Gerang (gadai), perspektif, hukum Islam.***

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. *Latar Belakang Masalah*

Ajaran Islam memerintahkan secara eksplisit kepada umat manusia untuk memegang nilai-nilai ajaran Islam secara *Kaffah* (total), menyeluruh, dan utuh. Manusia diperintahkan melaksanakan ajaran yang berkaitan dengan kewajiban individu kepada Allah swt. Dan juga berkaitan dengan kewajiban individu terhadap lingkungan dan sesama anggota masyarakat lainnya<sup>1</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya yang berkaitan dengan harta disebut muamalah. Masalah muamalah selalu dan terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan ataupun tipuan dari orang lain.

Muamalah mencakup masalah transaksi komersial (*al-Mu'awadat*) seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan seterusnya.<sup>2</sup> Gadai merupakan salah satu katagori dari perjanjian utang-piutang, praktek semacam ini telah ada pada zaman Rasulullah

---

<sup>1</sup> Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syari'ah* ( Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 21.

<sup>2</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* ( Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 6.

saw., dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong-menolong, yang kaya menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang kurang mampu. Bentuk dari tolong-menolong ini berupa pemberian pinjaman, atau utang-piutang. Dalam suatu perjanjian utang-piutang, debitur sebagai pihak yang berhutang meminjam uang atau barang dari kreditur sebagai pihak yang berutang. Agar kreditur merasa aman dan terjamin terhadap uang yang dipinjamkan, kreditur mensyaratkan sebuah jaminan. Oleh sebab itu, ia diperbolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan atas utangnya. Sehingga apabila debitur itu tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur. Konsep tersebut dalam fiqh muamalah dikenal dengan istilah “*rahn* atau *gadai*.”<sup>3</sup>

*Rahn* atau gadai adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak ke pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.<sup>4</sup> Hukum asal gadai adalah mubah/ boleh. Allah swt berfirman dalam surat al- Baqarah/2:283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَّقْبُوضَةً

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Muhammad Solikhul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 1.

<sup>4</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2015), h. 108.

<sup>5</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Quran, 2012), h.157

Gadai juga ada dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhary Muslim ia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya:

Rasulullah mengambil makanan dari seseorang yahudi yang harganya akan dibayarkan dalam satu jangka waktu tertentu. Sebagai jaminan Nabi menggadaikan baju besi beliau. (HR. Al-Bukhary, Muslim; *Al-Muntaqa* 2:360)<sup>6</sup>

Al-Qur'an dan Hadis tersebut dapat dipahami bahwa gadai hukumnya diperbolehkan, baik bagi yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang tinggal dirumah, dibenarkan juga melaksanakan transaksi dengan Non-Muslim selama tidak berkenaan dengan hal-hal yang diharamkan Islam dan harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi pinjaman.

Di dalam pelaksanaannya, si pemegang gadai (*murtahin*) berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama hutang belum lunas, tetapi ia tidak berhak mempergunakan atau memanfaatkan barang gadai tersebut, kecuali ada akad yang sudah dipersetujui oleh kedua belah pihak, dan apabila barang gadai merupakan barang yang tidak membutuhkan biaya perawatan, maka penerima gadai (*murtahin*) tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin pihak yang menggadaikan. Akan tetapi jika barang gadai memiliki manfaat dan pemberi hutang ingin mengambil manfaat maka wajib banginya untuk memberi perawatan.<sup>7</sup>

<sup>6</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-hadits Hukum III* (Semarang: Pustaka Rizki Putra 2011), h. 335.

<sup>7</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 201.

Selanjutnya jika si penghutang tidak bisa membayar hutangnya. Maka pemberi utang mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang jaminan tersebut. Apabila uang hasil penjualan barang jaminan tersebut melebihi jumlah utang, maka sisanya harus dikembalikan kepada penghutang, namun bila kurang dari jumlah utang, pihak pengutang harus menambahinya agar utang tersebut terbayar lunas.<sup>8</sup>

Hasil observasi yang dilakukan penulis kepada masyarakat muslim Desa Duwanur dalam praktik gadai kebun kelapa tanpa batasan waktu pengembalian utang. Gadai kebun kelapa biasanya dilakukan semata-mata karena kebutuhan yang sangat mendesak dan memerlukan dana secepatnya. Sedangkan proses gadai kebun kelapa tersebut dilakukan dengan cara yang sederhana, contoh si A yang akan menggadaikan kebun kelapanya (*rahin*) kepada si B yang akan memberikan pinjaman uang (*murtahin*). Masyarakat Duwanur biasanya menggadaikan kebun kelapanya kepada kerabat atau tetangganya sendiri. Dengan waktu pengembalian utang pinjaman tidak ditentukan, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun sebagai barang jaminan. Sehingga jaminannya adalah kebun kelapa yang dia miliki, kemudian kebun kelapa si A tersebut berpindah tangan dan diserahkan kepada si B. selama berada ditangan si B, hasil panen yang melimpah dari kebun kelapa si A menjadi haknya si B. jadi, apabila utang belum terlunasi sampai waktu bertahun-tahun sehingga hasil panen kebun kelapa tersebut sudah melebihi dari nilai utang yang dipinjamkan dan pada saat transaksi gadai itu dilaksanakan antara si A dan si B tidak mendatangkan

---

<sup>8</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 193.

saksi karena mereka sudah saling percaya. Pada saat si A dan si B melakukan transaksi gadai sebenarnya ada unsur keterpaksaan karena mau tidak mau si A harus rela barangnya digadaikan. Sehingga, pemanfaatan dan hasilnya dimiliki oleh si B serta batas waktu yang tidak ditentukan. Sedangkan Islam mengajarkan bahwa bermuamalah itu saling tolong menolong dan menguntungkan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan dan yang lebih penting lagi adalah memelihara nilai-nilai keadilan, jangan sampai mengambil kesempatan dalam kesempitan serta menghindari unsur-unsur penganiayaan.

Pembahasan tersebut dapat dikatakan bahwa Islam tidak membolehkan praktek gadai yang merugikan orang lain, melainkan bertujuan meringankan beban orang lain melalui bantuan utang piutang tanpa ada pihak yang dirugikan. Dengan demikian, maka saya mengadakan penelitian di Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur. Sebelumnya tidak ada peneliti yang melakukan penelitian tentang sistem gerang di Adonara Barat. Maka dari itu judul skripsi yang saya angkat adalah “Sistem *Gerang* (Gadai) Dalam Perspektif Islam Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur”

## **B. Rumusan Masalah**

Praktik gadai yang terjadi pada masyarakat Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur menimbulkan beberapa problem yang harus dibahas dan ditentukan jawabannya. Hal ini dikarenakan prosedur dari akad hingga pemanfaatan hasil lahan kelapa tidak semuanya berjalan sesuai dengan prosedur

gadai yang sesuai dengan syariat Islam dengan demikian penulis mengambil perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang mendorong masyarakat Duwanur memilih *gerang* (gadai)?
2. Bagaimana Sistem *gerang* (gadai) yang terjadi di masyarakat Duwanur Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur?
3. Bagaimana perspektif Islam terhadap praktik *gerang* (Gadai) di Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur?

### **C. Tujuan dan Manfaat penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong masyarakat memilih sistem *gerang* (gadai) di Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur.
  - b. Untuk mengetahui sistem *gerang* (gadai) yang diterapkan di Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur.
  - c. Untuk mengetahui Perspektif Islam terhadap praktik *gerang* (gadai) di Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur.
2. Manfaat penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya memberikan banyak manfaat baik bagi si peneliti maupun sipembaca, dan manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi untuk memperluas wawasan tentang hukum gadai yang sesuai dengan syariat Islam.



#### **D. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

Penelitian ini berjudul Sistem *Gerang* (Gadai) Dalam Perspektif Islam Di Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur. Oleh karna itu penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif, maka penelitian ini akan difokuskan pada ruang lingkup tentang Sistem *Gerang* (Gadai) Dalam Perspektif Islam. Sehingga penulis mengemukakan bahwa yang menjadi fokus penelitian ini yaitu:

- a. Faktor penyebab masyarakat memilih sistem *Gerang* (Gadai) di Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur.
- b. Sistem *Gerang* (Gadai) yang terjadi di Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur.
- c. Perspektif Islam terhadap praktik *Gerang* (Gadai) di Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur.

#### **E. Kajian Pustaka**

Penyusunan skripsi ini sebelum penulis mengadakan penelitian lebih lanjut kemudian menyusunnya menjadi suatu karya ilmiah, maka langkah awal yang penulis tempuh adalah mengkaji terlebih dahulu terhadap skripsi-skripsi terdahulu yang mempunyai judul hampir sama dengan yang akan penulis teliti. Maksud pengkajian ini adalah agar dapat diketahui bahwa apa yang penulis teliti sekarang tidak sama dengan penelitian dari skripsi-skripsi terdahulu.

Adapun penulis mengadakan suatu kajian kepustakaan, penulis akhirnya menemukan beberapa tulisan yang menulis judul hampir sama dengan yang akan penulis teliti, judul-judul tersebut antara lain adalah:

1. Hendra Nirwansyah, dengan judul “*Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo*” skripsi ini membahas bagaimana tinjau hukum islam terhadap praktik gadai sawah, yakni *rahin* yang menggadaikan sawahnya kepada *murtahin*, selama ditangan *murtahin* hak penggarapan, penanaman dan hasil panen sawah berada di tangan *murtahin*, dan waktu pengembalian pinjaman tersebut tidak ditentukan, ha ini tentunya bisa merugikan orang lain, .<sup>9</sup>
2. Ade tri cahyani, dengan judul sekripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat kec. Topas Kota Demak*”. Dalam penelitian ini penulis berfokus pada masalah yang dilihat dari praktek pelaksanaan gadai itu sendiri yang secara ketat ia harus menambahkan adanya bunga gadai (*rahin*) karna ia harus menambahkan sejumlah uang tertentu dalam melunasi hutangnya.<sup>10</sup>
3. Laila Isnawati, dengan judul sekripsi “*Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Brunggang Sangen Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo*” skripsi tersebut menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat desa tersebut melaksanakan gadai tanah (sawah) dan pemanfaatan barang jaminan oleh pihak kreditur/*murtahin* secara penuh tidak diperbolehkan karena barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang piutang untuk menambah kepercayaan kepada kreditur.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Hendra Nirwansyah, *Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, skripsi* ( sarjana fakultas syariah dan hukum UIN Alauddin Makassar, 2017).

<sup>10</sup>Ade tri cahyani, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kec. Topas kota Demak*”, *Skripsi* (Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015).

<sup>11</sup>Imamil Muttaqin, “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang*”, *Skripsi*, h.2.

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. Pengertian Gadai (Rahn)

Gadai dalam bahasa Arab disebut *al-Rahn*. *al-Rahn* adalah “suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang”.<sup>1</sup> *Rahn* atau *gadai* adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak ke pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.<sup>2</sup>

Di dalam Ensiklopedia Indonesia, sebagaimana dikutip M. Ali Hasan, disebut bahwa gadai atau hak gadai adalah hak atas benda terhadap benda bergerak milik orang yang berutang yang diserahkan ketangan orang yang memberi utang sebagai jaminan pelunasan orang yang berutang tersebut. Gadai mengharuskan adanya barang jaminan atau tanggungan.<sup>3</sup> Kata ini sejalan dengan firman Allah dalam QS al-Muddatstsir/74:38

Terjemahnya:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينٌ  
“Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas apa yang telah diperbuatnya”.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Rahmat Syafei, “Konsep Gadai: *al-Rahn* Dalam Fikih Islam Antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial” T. Yanggo, *Problematika hukum Islam Kontemporer III* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1995), h. 59.

<sup>2</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2015), h. 108.

<sup>3</sup> Idris, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nab* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 198.

<sup>4</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Quran, 2012), h. 576.

Adapun menurut istilah, gadai berarti menjadikan harta sebagai jaminan utang. Menurut Ibn Arafah, *rahn* adalah menjadikan barang sebagai jaminan utang yang dapat diambil kembali setelah utang dibayar. Mahmud Abd al-Rahman mendefinisikan *rahn* dengan menjadikan barang yang bernilai sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat atau cenderung mengikat.<sup>5</sup> Sedangkan, pengertian gadai yang terungkap dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH perdata), yaitu:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang kreditur atas sesuatu barang bergerak yaitu bertumbuh maupun tidak bertumbuh yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang akan memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.<sup>6</sup>

Dari definisi gadai tersebut terkandung beberapa unsure pokok, yaitu:

1. Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai.
2. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur.
3. Barang yang menjadi obyek gadai hanya benda bergerak, baik bertumbuh maupun tidak bertumbuh.
4. Kreditur pemegang gadai “berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu dari pada kreditur-kreditur lainnya.”<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Idris, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*), h.198.

<sup>6</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* ( Jakarta :Penadamedia Group, 2009), h. 387.

<sup>7</sup>Purwahid Patrik Dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, (Semarang: Fakultas Hukum Undip, 2003), h. 3.

Gadai adalah merupakan suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu pinjaman barang bergerak, yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya, terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.<sup>8</sup>

Ulama fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikan *rahn*:<sup>9</sup>

1. Menurut ulama Syafi'iyah, gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar hutang.
2. Menurut ulama Hanabilah, gadai adalah harta yang dijadikan jaminan hutang sebagai pembayar harga (nilai) hutang ketika yang berutang berhalangan (tidak mampu membayar) hutangnya kepada pemberi pinjaman.

Gadai menurut syariah adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan ditarik kembali. Gadai juga bisa diartikan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil semua utangnya atau sebagian. Dengan kata lain, gadai adalah akad berupa menggadaikan barang dari satu pihak kepada satu pihak lain, dengan utang sebagai gantinya.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Sri Soedewi masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Bend* Cet. Ke V (Yogyakarta: Liberty, 1974), h. 96-97.

<sup>9</sup>Syafei Rachmat, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 159-160

<sup>10</sup>Khotibul Umam, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2016), h. 173.

Secara umum gadai merupakan tindakan atau perbuatan dalam bidang perekonomian. Orang yang menggadaikan suatu barang mendapatkan uang sebagai imbalan, uang tersebut merupakan utang dengan jaminan barang yang diserahkan kepada kreditur. Kegiatan perekonomian terutama perekonomian syari'ah tidak terbatas hanya merujuk pada bebasnya dari suatu *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Para ahli ekonomi Islam dalam fuqaha mendiskusikan tentang perekonomian yang Islami dengan menyepakati bahwa perekonomian Islam harus memenuhi sekurang-kurangnya dua kriteria, yaitu:

1. Diselenggarakan dengan tidak melanggar rambu-rambu syari'ah.
2. Membantu mencapai tujuan sosio-ekonomi umat dan masyarakat dengan berdasar pada ajaran agama.

Dalam prakteknya pelaku bisnis harus memperhatikan segala tindakannya apakah berada dalam bingkai ajaran Islam dengan memegang teguh prinsip-prinsip moral dan etika atau bahkan sebaliknya. Karena hal ini sangat berimplikasi pada seluruh aspek kehidupan manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu kegiatan ekonomi (muamalah) Islam, termasuk di dalamnya gadai (gadai tanah). Harus didasarkan pada empat prinsip muamalah, yaitu:

1. Segala bentuk muamalah pada dasarnya adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Quran dan Sunnah Rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam kehidupan masyarakat.

4. muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.<sup>11</sup>

Dapat dikatakan bahwa gadai (*rahn*) adalah bentuk perjanjian yang dilakukan secara tidak tunai atau dalam bentuk utang piutang dengan menggunakan benda sebagai jaminan atas utang itu dan jika dalam waktu jatuh tempo yang telah ditentukan utang tersebut belum terbayar, maka jaminan dapat dijual untuk melunasi utang. Gadai juga dapat diartikan dengan akad seseorang yang mempunyai utang kepada orang lain dan menjadikan barang miliknya sebagai jaminan atas utang tersebut sehingga ia melunasi utangnya secara keseluruhan.

### **B. Dasar Hukum Gadai**

Dasar hukum yang menjadi landasan diperbolehkannya hutang piutang dengan barang jaminan (gadai), terdapat dalam al-Qur'an, Hadis, Pendapat Ulama" serta Fatwa DSN-MUI yang dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Al-Qur'an**

QS. al-Baqarah/2: 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً

Terjemahnya:

jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang<sup>12</sup>.

Ayat di atas menegaskan bahwa jika ada seseorang yang mengadakan perjanjian hutang piutang dengan orang lain yang tidak (mampu) menulis sendiri, maka hendaknya orang yang berhutang memberikan sesuatu barang yang berharga

<sup>11</sup> Ahmad azhar basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Pers, 2000), h. 15.

<sup>12</sup> Kementrian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, h.49.

yang dimilikinya sebagai jaminan atas utangnya. Hal ini dapat dimaksudkan agar orang yang mengutangkan tidak akan mengalami keraguan. Pada ayat tersebut disebutkan menyerahkan barang tanggungan kepada yang memberikan utang sebagai jaminan utangnya tersebut. Hal itu untuk menanamkan rasa percaya, karena dalam perjalanan tidak akan mendapatkan seorang penulis yang akan mencatat perjanjian tersebut. Dengan demikian menurut pendapat tersebut, yang menjadi syarat sahnya perjanjian utang piutang baik dalam perjalanan maupun keadaan mukim adalah adanya suatu barang yang bernilai menurut pandangan syara' yang dijadikan sebagai jaminan hutang.

## 2. Hadis

Berkenaan dengan akad gadai dijelaskan dalam hadits, sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya

Rasulullah mengambil makanan dari seseorang yahudi yang harganya akan dibayarkan dalam satu jangka waktu tertentu. Sebagai jaminan Nabi menggadaikan baju besi beliau.<sup>13</sup>

Dari hadis di atas praktek gadai sudah pernah diajarkan Nabi Muhammad saw, Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya sebagai jaminan untuk mendapatkan gandum, sehingga dapat disimpulkan bahwa hukumnya gadai itu boleh, serta hadis diatas dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membedakan antara orang

<sup>13</sup>Imam al-Bukhari, *sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1891), III: 1115, Bab Fi Rahni Fi al-Hadis. Hadis riwayat al-Bukharidari Musaddad dari ab al-Wahid dari al-A'mas dari Ibrahim.



Muslim dan non-Muslim dalam bidang muamalah, maka seorang Muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun pada non-Muslim.

### 3. Ijma' Ulama

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam al-Quran dan al-Hadits dalam pengembangannya selanjutnya dilakukan oleh para fuqaha dengan jalan ijtihad, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehan nya demikian juga dengan landasan hukumnya. Namun demikian, perlu dilakukan pengkajian ulang yang lebih mendalam bagaimana seharusnya pegadaian menurut landasan hukumnya.<sup>14</sup>

Para Ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw. Tersebut ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya, kepada seorang yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw. Yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan Nabi Muhammad saw. kepada mereka. Ijtihad berkaitan dengan praktek utang piutang dengan jaminan (gadai) seperti timbulnya persoalan tentang adanya siapa yang menanggung biaya pemeliharaan barang jaminan (*marhun*) selama berada pada pihak yang memberi piutang (*murtahin*). Oleh karna itu, para fuqoha' berusaha merumuskan ketentuan-ketentuan dalam utang piutang dengan jaminan (gadai) tanpa keluar dari aturan hukum Islam. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing pihak yang melibatkan

---

<sup>14</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta:pt. ekonsia, 2003), h.159.

dirinya pada perjanjian utang piutang dengan jaminan (gadai) tidak saling merugikan atau terdapat unsur-unsur yang menimbulkan kemudharatan. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian utang piutang itu merupakan “hasil ijtihad para fukaha” antara lain tentang rukun dan syarat-syarat dalam perjanjian utang piutang dengan jaminan (gadai)<sup>15</sup>

### **C. Rukun dan Syarat Rahn (Gadai)**

#### **1. Rukun Rahn**

Rukun *rahn* menurut jumhur ulama, *rukun rahn* ada empat yaitu

- a. Syarat Aqid (*rahin* dan *murtahin*).
- b. Syarat Shighat (lafaz ijab dan qobul).
- c. Syarat Utang (*marhun bih*).
- d. Syarat Harta Yang Dijadikan Jaminan (*marhun*).

Adapun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *rahn* hanya ijab dan Kabul. Disamping itu, menurut untuk sempurna dan mengikatnya akad *rahn* ini, maka diperlukan adanya penguasaan barang, oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad (*rahin* dan *murtahin*), harta yang dijadikan jaminan (*marhun*) dan utang (*marhun bih*) menurut ulama Hanafiyah hanya termasuk syarat-syarat *rahn*, bukan rukunnya<sup>16</sup>.

<sup>15</sup> Imam Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiran bin Bardizbah Al-Bukhari Al-ju'fiy, *Shahih Al-Bukhari*, Juz III (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1996), h.161.

<sup>16</sup>Abdi Widjaya, *Konfigurasi Akad Dalam Islam*, (Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar), h. 92.

## 2. Syarat-syarat *Rahn*

Dalam *rahn* disyaratkan beberapa syarat berikut.

### a. Persyaratan Aqid

Kedua orang yang akad harus memenuhi kreterial *al-Ahliyah*. Menurut ulama Syafi'iyah *Ahliyah* adalah orang yang telah sah untuk jual beli, yakni berakal dan *mumayyiz* (Baligh), tetapi tidak disyaratkan harus baligh. Dengan demikian, anak kecil yang sudah *mumayyiz* (Baligh), dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan *rahn*.

Menurut ulama selain Hanafiyah, *ahliyah* dalam *rahn* seperti pengertian *ahliyah* dalam *rahn* dalam jual beli dan derma. *Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum baligh. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali dalam keadaan mendarat dan menyakini bahwa pemegangannya yang dapat dipercaya.<sup>17</sup>

### b. Syarat *shighat* ( *ijab* dan *qobul* )

Menurut hanafiyah, *shighat* gadai (*rahn*) tidak boleh digantungkan dengan syarat, dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan akad gadai (*rahn*) menyerupai akad jual beli, dilihat dari, dilihat dari aspek pelunasan hutang. Apabila akad gadai digantungkan kepada syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad menjadi *fasid* seperti halnya jual beli.

Apabila akad gadai disertai dengan syarat yang *fasid* atau *batil* maka hukum gadainya sa, tetapi syaratnya batal karena gadai bukan akad *mu'awadhah maliyah*. Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat gadai sama dengan syarat jual beli, karena gadai

---

<sup>17</sup>Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 162

merupakan akad *maliyah*, adapun syarat-syarat yang dikaitkan dengan akad gadai hukumnya dapat dirinci menjadi empat bagian, yaitu sebagai berikut.

- 1) Apabila syarat itu sesuai dengan maksud akad, seperti memprioritaskan pelunasan utang kepada *murtahin*, ketika pemberi utang (kreditor) lebih dari satu orang, maka akad gadai dan syarat hukumnya sah.
- 2) Apabila syarat tersebut tidak sejalan dengan akad, seperti syarat yang tidak ada kemaslahatannya atau tidak ada tujuannya, maka akad gadai hukumnya sah, tetapi syaratnya batal (tidak berlaku).
- 3) Apabila syarat tersebut merugikan *murtahin* dan menguntungkan *rahin*, seperti syarat harta jaminan tidak boleh dijual ketika utang jatuh tempo, maka syarat dan akad gadai hukumnya batal.
- 4) Apabila syarat tersebut menguntungkan *murtahin* dan merugikan *rahin*, seperti syarat harta jaminan boleh diambil manfaatnya oleh *murtahin*, maka hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Menurut pendapat yang lebih *zhahir*, syarat dan akad hukumnya batal karena syarat bertentangan dengan tujuan akad. Menurut pendapat yang kedua, syaratnya batal tetapi akad gadainya sah, karena gadai merupakan akad *tabarru*, sehingga tidak terpengaruh oleh syarat yang *fasid*.

Malikiyyah berpendapat bahwa syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan akad hukumnya sah. Adapun syarat yang bertentangan dengan tujuan akad maka syarat tersebut *fasid* dan dapat membatalkan akad gadai. Contohnya *rahin* mensyaratkan agar barang jaminan tetap di tangan *rahini* dan tidak diserahkan kepada

*murtahin*. Hanabilah berpendapat sama dengan Malikiyah, yaitu membagi syarat kepada *sahih* dan *fasid*.<sup>18</sup>

c. Syarat utang (*marhun bih*)

Menurut ulama Hanafiyyah, syarat utang dalam gadai adalah:

- 1) Merupakan hak yang wajib diberikan kepada pemiliknya.
- 2) Pembayaran utang dari harga yang ditentukan.
- 3) Hak utang itu diketahui.

Menurut ulama Hanafiyyah, syarat-syarat utang gadai adalah:

- 1) Utang itu hendaklah barang yang wajib diserahkan. Utang itu hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun berbentuk benda
- 2) Utang itu memungkinkan dapat dibayarkan. Jika utang tidak dapat dibayarkan, *rahn* menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyaratkannya *rahn*,
- 3) Hak atas utang harus jelas sehingga tidak boleh memberikan dua utang tanpa dijelaskan utang mana yang menjadi gadai.

Ulama Hanabilah dan syafi'iyah memberikan tiga syarat bagi utang dalam gadai:

- 1) Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan.
- 2) Utang harus lazim pada waktu akad.
- 3) Utang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan *murtahin*.

d. Syarat yang berkaitan dengan barang yang digadaikan (*marhun*).

- 1) Barang yang digadaikan dapat diperjual belikan

---

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h. 292.

- 2) Berupa harta benda, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang bukan harta seperti mayat.
- 3) Barang gadai dapat diambil manfaatnya menurut syara' sehingga dapat digunakan untuk membayar utang.
- 4) Barang gadai itu diketahui .
- 5) Barang gadai dimiliki oleh orang yang menggadaikan (*rahin*).
- 6) Barang gadai terbebas dari hak orang yang menggadaikan.
- 7) Barang gadai terpisah dari yang lain.
- 8) Barang gadai dapat dibedakan sehingga tidak boleh menggadaikan separuh kamar atau seperempat kendaraan.<sup>19</sup>

Dapat disimpulkan bahwa barang yang digadaikan harus jelas dan bisa diserahkan setelah terjadi kesepakatan antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*)

#### **D. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai**

Dalam perjanjian gadai antara pemberi dan penerima gadai terdapat hak dan kewajiban antara keduanya.

1. Hak dan kewajiban penerima gadai (*murtahin*):
  - a. Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
  - b. Penerima gadai berhak mendapat penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*).

---

<sup>19</sup>Idris, *Hadis Ekonomi : Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, h. 206-209.

- c. Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*rahin*).

Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud. Muncul kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

- 1) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
  - 2) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadi
  - 3) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum dilakukan pelelangan harta benda gadai.
  - 4) Penerima gadai berkewajiban memelihara barang gadai dengan cara wajar sesuai dengan keadaan barang dan penerima gadai mempunyai hak untuk melunasi kewajibannya.
  - 5) Penerima gadai berkewajiban mengembalikan barang gadai kepada pemberi gadai jika utangnya telah dilunasi.<sup>20</sup>
2. Hak dan kewajiban pemberi gadai (*rahin*):
- a. Pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah melunasi pinjaman utangnya.
  - b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
  - c. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya lainnya.

---

<sup>20</sup>Idris, *Hadis Ekonomi : Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, h. 210.

- d. Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima diketahui menyalahgunakan harta benda gadainya.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai tersebut, maka munculah kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Pemberi gadai berkewajiban menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai yang telah memberikan utang kepadanya dan ia mempunyai hak kuasa atas barang yang digadaikan.
- 2) Jika sudah tiba waktunya, maka pemberi gadai wajib melunasi utangnya kepada penerima gadai, jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka penerima gadai bisa mengambil atau melelang barang gadai. Jika utang dilunasi maka pemberi gadai berhak mengambil kembali barang yang digadaikan.

#### **E. Hukum-Hukum Gadai dan Dampaknya**

##### **1. Hukum-Hukum Gadai (*rahn*)**

Ada dua hal yang menjadi pembahasan hukum gadai (*rahn*), yaitu:

##### **a. Hukum Gadai Yang Shahih**

Akad gadai mengikat bagi *rahin*, bukan bagi *murtahin*. Oleh karena itu, *rahin* tidak berhak untuk membatalkan akad karena gadai merupakan akad jaminan atas utang. Sebaliknya, *murtahin* berhak untuk membatalkan akad gadai kapan saja ia khendaki, karena akad tersebut untuk kepentingannya.



Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Hanafiyah, dan syafi'iyah, dan Hanabilah, akad gadai baru mengikat dan menimbulkan akibat hukum apabila jaminan telah diserahkan. Sebelum jaminan diterima oleh *murtahin* maka *rahin* berhak untuk meneruskan akad atau membatalkannya. Alasannya seperti telah dikemukakan di muka dalam QS Al-Baqarah/2:283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً

Terjemahnya;

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutan).<sup>21</sup>

Kata *rihanun* adalah *masdar* yang disertai dengan *fa'a* sebagai jawab syarat mengandung arti *amar* (maka gadaikanlah). Perintah terhadap sesuatu (gadai) yang disifati dengan suatu sifat (*maqbudhah*) menunjukkan bahwa sifat tersebut merupakan syarat. Orang karena itu, berdasarkan pengertian tersebut akad gadai belum mengikat (*lazim*) kecuali setelah diterima (*qabdh*).

Menurut malikiyah, akad gadai mengikat (*lazim*) dengan terjadinya *ijab* dan *qabul*, dan sempurna dengan terlaksananya penerimaan (*qabdh*). Dengan demikian, apabila *ijab* dan *qabul* telah dilaksanakan maka akad langsung mengikat, dan *rahin* dipaksa untuk menyerahkan barang gadaian kepada *murtahin*. Alasannya adalah men-*qiyas*-kan akad gadai dengan akad-akad lain yang mengikat dengan telah dinyatakan *ijab* dan *qabul*<sup>22</sup>, berdasarkan firman Allah dalam Q.S Al-ma'idah/5:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

<sup>21</sup> Kementrian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, h.49.

<sup>22</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (jakarta: Amzah, 2013), h. 304,

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman penuhilah akad-akad itu.<sup>23</sup>

b. Hukum Gadai (*Rahn*) Yang Fasid

Para ulama mazhab sepakat bahwa akad gadai yang tidak *shahih*, baik *fasid* maupun batil tidak menimbulkan akibat-akibat hukum berkaitan dengan barang yang digadaikan, dalam hal ini *murtahin* tidak memiliki hak untuk menahan *marhun*, dan *rahn* berhak meminta kembali barang yang digadaikan dari *murtahin*, apabila *murtahin* menolak mengembalikannya sehingga barang rusak, maka *murtahin* dianggap sebagai *ghasib*. Dan ia harus mengganti kerugian dengan barang yang sama apabila *mal*-nya termasuk *mal mitsli*, atau membayar harganya apabila *mal qimi*

Apabila *rahn* meninggal dan ia berutang kepada beberapa orang maka *murtahin* dalam gadai yang *fasid* lebih berhak untuk diprioritaskan daripada kreditor yang lain. Hal ini sama seperti halnya dalam gadai yang *shahih*. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiah dan Malikiyyah. Menurut syafi'iyah dan Hanabilah, hukum akad gadai yang *fasid* sama dengan akad yang *shahih* dalam hal ada dan tidak adanya *dhaman* (tanggung jawab). hal tersebut dikarenakan apabila suatu akad yang *shahih* menghendaki adanya penggantian (*dhaman*) setelah terjadinya penyerahan, apalagi dalam akad yang *fasid*. Apabila dalam akad yang *shahih* *murtahin* tidak bertanggung jawab atas rusaknya barang jaminan yang bukan karena kelalaian atau keteledorannya, maka demikian pula halnya dalam akad gadai yang *fasid*.<sup>24</sup>

2. Akibat-Akibat Hukum *Rahn*

Apabila akad gadai telah sempurna dengan diserahkannya barang yang digadaikan kepada *murtahin*, maka timbullah hukum-hukum sebagai berikut.

a. Adanya hubungan antara utang dengan barang jaminan

<sup>23</sup> Kementrian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, h. 106.

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, h. 305.

Utang tersebut hanya sebatas utang yang diberikan jaminan, bukan utang-utang lainnya

b. Hak untuk menahan barang jaminan

Adanya hubungan antara utang dan barang jaminan memberikan hak kepada *murtahin* untuk menahan barang jaminan ditangannya atau ditangan orang lain yang disepakati bersama yang disebut dengan ‘*adl* dengan tujuan untuk mengamankan utang. Apabila utang telah jatuh tempo maka barang gadai bisa dijual untuk membayar utang.

c. Menjaga barang jaminan (*Marhun*)

Dengan adanya hak menahan *marhun*, maka *murtahin* wajib menjaga *marhun* tersebut, seperti menjaga hartanya sendiri, karena *marhun* tersebut merupakan titipan dan amanah. Demikian pula istrinya, anak-anaknya serta pembantunya yang tinggal bersamanya juga diwajibkan turut menjaga *marhun* tersebut.

d. Pembiayaan Atas Barang Jaminan (*Marhun*)

Para ulama sepakat bahwa pembiayaan atas *marhun* dibebankan kepada *rahin*. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang jenis pembiayaan yang wajib dikeluarkan oleh *rahin*.

1) Menurut ulama Hanafiah, pembiayaan dibagi antara *rahin* selaku pemilik barang dan *murtahin*, yang dibebani pemeliharaannya, dengan rincian sebagai berikut:

a) Setiap biaya yang berkaitan dengan kemaslahatan *marhun* dibebankan kepada *rahin* karena barang tersebut miliknya. Misalnya biaya makan dan minum binatang serta upah upah petugas yang mengembalaknya.

b) Setiap biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan *marhun* dibebankan kepada *murtahin*, karena ia yang menahan barang tersebut termasuk risikonya. Misalnya upah petugas yang menjaga binatang yang menjadi *marhun*.

2) Menurut jumhur yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, semua biaya yang berkaitan dengan *marhun* dibebankan kepada *rahin*, baik yang berkaitan dengan biaya menjaganya, pengobatan, maupun biaya lainnya. Apabila *rahin* tidak bersedia menanggung biaya tersebut, menurut Malikiyah, biaya dibebankan kepada *murtahin*. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah, hakim harus memaksa *rahin* untuk memberikan biaya yang berkaitan dengan *marhun* jika ia berada ditempat dan dipandang mampu. Apabila *rahin* tidak mampu, maka hakim bisa memerintahkan *murtahin* untuk membiayainya, dan biaya tersebut diperhitungkan dengan sebagai utang *rahin*. Menurut Hanabilah apabila *murtahin* mengeluarkan biaya tanpa persetujuan *rahin*, padahal ia mampu untuk meminta izin kepadanya, maka berarti ia (*murtahin*) melakukannya dengan sukarela, dan oleh karenanya ia tidak berhak meminta penggantian kepada *rahin*<sup>25</sup>.

e. Memanfaatkan Barang Jaminan

Seperti telah dijelaskan dalam fikih Islam, barang gadaian dipandang sebagai amanat pada tangan *murtahin*, sama dengan amanat lain, dia tidak harus membayar kalau barang itu rusak, kecuali jika karna tindakannya. Penerima gadai hanya bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan berusaha semaksimal mungkin agar barang itu tidak rusak. Barang jaminan yang rusak diluar kemampuan *murtahin*

---

<sup>25</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h. 306.

tidak harus diganti. Sedangkan biaya pemeliharaannya boleh diambil dari manfaat barang itu sejumlah biaya yang diperlukan.<sup>26</sup>

Para Ulama Fikih berpendapat bahwa barang yang dijadikan jaminan tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan sama sekali, karna tindakan itu termasuk menyia-nyiakan harta<sup>27</sup>. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan apakah boleh bagi pihak *murtahin* memanfaatkan barang jaminan itu. Dalam hal ini ulama beda pendapat.

Hanafiyah berpendapat *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* baik cara menggunakan, mengendarai, minum susu, atau mendiami rumah yang digadaikan, kecuali atas izin *rahn*. Karna *murtahin* hanya berhak untuk menahan barang gadai tidak untuk memanfaatkan. *Murtahin* tidak berhak memanfaatkan barang yang digadaikan sekalipun diizinkan oleh *rahn*. Sebagian ulama Hanafiyah yang lain melarang karna itu adalah riba. Keizinan dan kerelaan tidak menghalalkan riba. Memanfaatkan barang gadai sama dengan *qardh* (utang piutang) yang menguntungkan dan setiap bentuk *qard* (utang piutang) yang menguntungkan adalah riba<sup>28</sup>. Hal ini telah ditegaskan dalam hadis Nabi Saw:

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرِّبَا.

Artinya:

Dari fadhlah ibn ubaid sahabat Nabi Saw., sesungguhnya Nabi berkata: “semua utang piutang yang mendatangkan manfaat adalah salah satu bentuk dari riba”<sup>29</sup>

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 40.

<sup>27</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), h.167.

<sup>28</sup> Rozalinda, *Fikih ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 259

<sup>29</sup> Imam al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid III (tt: Syarikah Nur Asiah 1981), h. 115.

Menurut ulama Malikiyah, manfaat atau nilai tambah yang datang dari barang jaminan adalah milik *rahin* (orang yang menggadaikan) dan bukan untuk *murtahin* (penerima gadai). Tidak boleh mensyaratkan pengambilan manfaat dari barang jaminan, karna larangan tersebut hanya berlaku pada utang piutang. Adapun pada perjanjian gadai, mereka memberi kelonggaran kepada penerima jaminan untuk memanfaatkan barang jaminan, jika pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari *marhun* diperuntukan pada dirinya maka waktu pengambilan manfaat yang telah disyaratkan “harus ditentukan batas waktunya, apabila tidak ditentukan maka syarat gadai batal”.<sup>30</sup> Pada dasarnya tidak boleh terlalu lama memanfaatkan *marhun* sebab hal itu akan menyebabkan *marhun* hilang atau rusak.

Ulama Syafi’iyah berpendapat sama dengan Malikiyah, bahwa *rahin* dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai. Jika tidak menyebabkan barang gadai itu berkurang, tidak perlu meminta izin kepada *murtahin*, seperti mengendarainya, dan menempatkannya, jika *murtahin* mensyaratkan dalam akad *qardh* hasil dan manfaat *marhun* menjadi miliknya maka syarat itu batal<sup>31</sup>. Memanfaatkan benda gadai berdasarkan hadis Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ  
الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ (رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ)

Artinya:

Dari Abu Hurayrah r.a., katanya: Rasulullah saw bersabda, “janganlah gadai itu ditutup dari pemilik yang menggadaikannya, ia berhak memperoleh bagiannya dan kewajiban (membayar) utangnya.” (HR. al-Daruquthni dan al-Hakim)<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Muhammad Dan Sholikhulm Hadi, *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Pegadaian Nasional, Edisi I*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 70.

<sup>31</sup> Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 269.

<sup>32</sup> Wahbah Az-Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jilid V (Jakarta: Gema inani: 2011), h. 182.

Berdasarkan hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa *marhun* itu hanya sebagai jaminan atau kepercayaan atas *murtahin*. Kepemilikan *marhun* tetap melekat pada *rahin*. Oleh karena itu manfaat atau hasil dari *marhun* itu tetap berada pada *rahin* kecuali manfaat atau hasil dari *marhun* itu diserahkan kepada *murtahi*. Selain itu, perlu diungkapkan bahwa pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* yang mengakibatkan turun kualitas *marhun* tidak dibolehkan kecuali diizinkan oleh *rahin*.

Sementara itu, ulama Hanabilah berpendapat pada selain hewan yang tidak membutuhkan perawatan tidak boleh bagi *murtahin* memanfaatkan tanpa izin *ar-rahin* manfaat dan pertumbuhan *marhun* adalah milik dari *rahin*. Lain halnya jika *rahin* mengizinkan *murtahin* memanfaatkan *marhun* tanpa ada *iwad* (kompensasi) maka utang *rahn* dari *qardh* (utang piutang) tidak boleh karena setiap *qardh* yang mendatangkan manfaat adalah haram. Boleh bagi *murtahin* memanfaatkannya seperti dikendarai atau membawa barang sesuai dengan kadar pemeliharaannya sekalipun tidak ada izin dari *rahin*<sup>33</sup>.

Dengan ketentuan di atas, jelaslah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu adalah orang yang menggadaikan barang tersebut dan bukan penerima gadai. Walaupun yang mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari barang jaminan itu adalah orang yang menggadaikan, namun kekuasaan atau barang jaminan ada ditangan si pemberi gadai. Hanya ada waktu barang tersebut diambil manfaat kekuasaan untuk sementara waktu beralih kepada yang menggadaikan. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Akad *rahn* dimaksud sebagai bentuk

---

<sup>33</sup>Rozalinda, *Fikih ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 260.

kepercayaan dan jaminan atas pemberian utang, bukan mencari keuntungan darinya. Karna mengambil suatu keuntungan dari utang adalah riba. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَهُوَ نَأْيٌ وَلَبْنُ الدَّرِيِّشْرِ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرِبُ النَّفَقَةَ (رَوَاهُ الْبُجَارِيُّ)

Artinya;

Dari Abu Hurayrah r.a., katanya: Rasulullah saw. Bersabda, “Binatang yang digadaikan boleh ditunggangi dengan diberikan biaya jika ia gadaikan dan susu binatang boleh diminum dengan diberikan biaya jika digadaikan. Orang yang mengendarai binatang itu dan meminum susunya diharuskan membayarkan biayanya”.<sup>34</sup>

#### F. *Pertambahan Gadai*

Ulama fikih sepakat bahwa tambahan yang timbul dan terjadi pada jaminan (barang yang digadaikan) adalah milik *rahn*, karena dialah pemilik aslinya, dan tambahan tersebut merupakan tambahan atas miliknya itu. Namun, dalam rinciannya terdapat sedikit perbedaan diantara mereka.

1. Menurut Hanafiyah semua tambahan yang timbul dan terjadi pada jaminan, termasuk kepada *rahn*, baik yang berkaitan dengan *rahn*, seperti buah, susu, dan bulu, maupun yang terpisah, seperti anak hewan. Adapun tambahan yang tidak ada kaitannya dengan *rahn*, melainkan murni milik *rahn*, dan tidak ada kaitannya dengan utang piutang karena hal tersebut merupakan hasil transaksi antara pemilik gadai dengan pihak lain, bukan timbul dari harta (*rahn*).

Pendapat ini diikuti juga oleh Malikiyah dan Syafi'iyah.

2. Menurut Malikiyah, semua tambahan yang timbul dari, menyatu dengan dan tidak terpisah dari jaminan, seperti lemak, atau terpisah tetapi merupakan hasil

<sup>34</sup>Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiran bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fiy, *Shahih Al-Bukhari*, Juz III, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1996, h. 161.



pengembangbiakan, seperti anak kambing, terpaksa ke dalam *rahn*. Adapun tambahan yang tidak sesuai dengan kejadian dan bentuk *marhun* (jaminan), baik yang timbul dari jaminan seperti buah-buahan sari pohon, maupun yang terpisah, seperti sewa rumah dan hasil bumi, tidak termasuk *marhun*.

3. Menurut Syafi'iyah, semua tambahan yang menyatu dengan *rahn*, yakni tambahan yang merupakan sifat, seperti gemuk, besar, indah, dan tumbuhnya buah, termasuk ke dalam *rahn*. Hal tersebut karena tambahan tersebut mengikuti pokoknya (jaminan) dan tidak bisa dipisahkan dari jaminan. Adapun tambahan atau pertumbuhan yang terpisah dari jaminan, seperti anak hewan, bulu, susu, telur, atau sewa rumah, tidak termasuk ke dalam *rahn*. Dengan demikian, tambahan tersebut milik *rahn*. Di samping itu, *rahn* adalah suatu akad yang tidak menghilangkan hak milik atas benda yang digadaikan, sehingga dengan demikian, tambahan yang sifatnya terpisah dari benda, tidak termasuk yang digadaikan.
4. Menurut Hanabilah, semua tambahan dan penghasilan dari benda yang digadaikan, baik yang menyatu atau yang terpisah, baik yang timbul dari *rahn* atau tidak, merupakan bagian dari *rahn* (jaminan) yang ada di tangan *murtahini* atau wakilnya, dan bisa dijual bersama-sama dengan benda pokoknya untuk membayar utang apabila diperlukan. Hal itu karena hubungan antara utang dengan harta yang digadaikan ditetapkan berdasarkan akad, sehingga termasuk didalamnya tambahan dan manfaat. Dengan demikian, hukum tambahan dan manfaat tersebut sama dengan hukum atas *rahn* (jaminan) itu sendiri<sup>35</sup>.

---

<sup>35</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h. 312.

### G. Berakhirnya Akad Gadai

Barang gadai adalah amanat yang ada ditangan pemegang gadai, ia tidak berkewajiban meminta ganti kecuali jika melewati batas waktu. akad *rahn* dianggap berakhir apabila

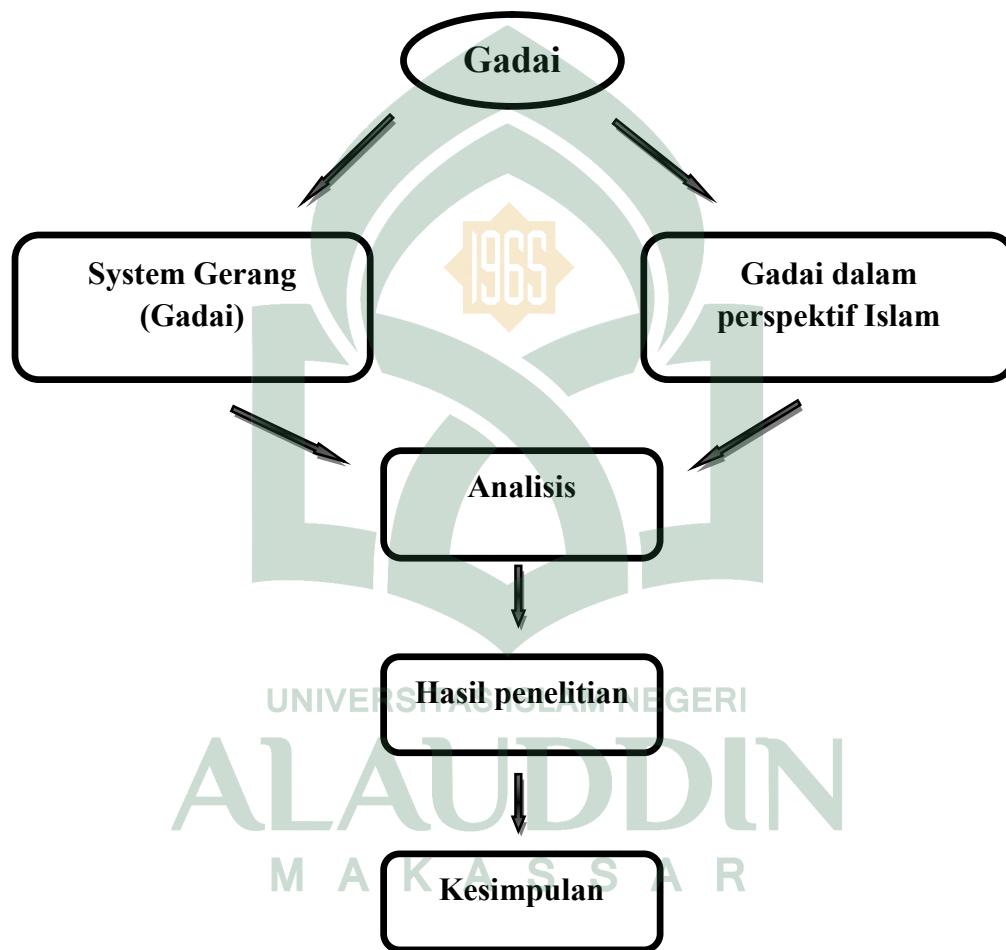
1. Barang gadai diserahkan kepada pemiliknya (*rahin*). Menurut jumhur ulama selain Syafi'iyah, akad berakhir karena diserahkannya *marhun* kepada pemiliknya (*rahin*).hal ini karena gadai merupakan jaminan terhadap utang. Apabila *marhun* diserahkan kepada *rahin*, maka jaminan dianggap tidak berlaku, sehingga akad gadai berakhir.
2. *Rahin* melunasi semua utangnya.
3. Apabila yang disepakati telah jatuh tempo maka *murtahin* bisa menjual *marhun*. Apabila *rahin* tidak mau menjual *marhun* maka hakim yang menjualnya untuk melunasi utangnya (*rahin*). Dengan dilunasinya utang tersebut, maka akad gadai telah berakhir.
4. Menurut malikiyah, gadai berakhir dengan meninggalnya *rahin* sebelum *marhun* diterima oleh *murtahin*, atau gila, sakit keras yang menyebabkan kematian.
5. Pembatalan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*
6. Rusaknya barang gadai tanpa sebab.
7. Memanfaatkan barang *rahin* dengan penyewaan, hibah, atau sedekah baik dari pihak *rahin* maupun *murtahin*, maka akad gadai menjadi berakhir<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Idris, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, h.198.

## H. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual pelaksanaan *gerang* (gadai) kebun kelapa pada Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur dapat digambarkan dalam bagan kerangka Konseptual sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2.1

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

###### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang mengumpulkan datanya menggunakan metode deskriptif, yaitu pengumpulan data dari informan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang secara *holistik* bermaksud untuk memahami fenomena tentang kejadian yang dialami subjek penelitian baik itu prilakunya, persepsi, motivasi maupun tindakannya, dan secara deskriptif dalam bentuk kata-kata atau bahasa, pada suatu konteks khusus yang dialami dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>1</sup> Diantaranya adalah penggunaan studi kasus deskriptif dalam penelitian ini bermaksud untuk dapat mengungkapkan atau memperoleh informasi dari data penelitian secara menyeluruh dan mendalam<sup>2</sup>

Berdasarkan pada pandangan diatas, maka penelitian kualitatif dalam tulisan ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta, lalu memberikan penjelasan terkait dengan berbagai realita yang ditemukan. Oleh karena itu, penulis langsung mengamati atau turun langsung melihat peristiwa-peristiwa di lapangan yang berhubungan dengan sistem gadai yang diterapkan pada masyarakat Adonara Barat.

---

<sup>1</sup> Lexy J, Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung; Remaja Kerta Karya, 1998), h. 6.

<sup>2</sup> Sugiyanto, *Statistik Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 35.

## 2. Lokasi Penelitian

S. Nasution berpendapat bahwa ada tiga unsure penting yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian tempat, pelaku dan kegiatan.<sup>3</sup> Penelitian tentang system *gerang* (gadai) dalam perspektif islam di Adonara Barat. Adapun hal yang menjadi dasar pemilihan tempat di Adonara Barat ini karena masyarakat pada umumnya belum terlalu banyak berpendidikan dan semua yang terjadi di Adonara Barat tidak seperti masyarakat modern pada saat ini. Kurangnya kesadaran masyarakat Adonara Barat mengenai dampak yang disebabkan oleh system *gerang* (gadai).

Adapun pertimbangan penulis dalam penentuan lokasi penelitian ini. Dikarenakan ketidak sesuaian sistem yang diterapkan pada masyarakat Adonara Barat.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola pikir yang dipergunakan penelitian dalam menganalisis sarannya atau dalam ungkapan lain pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekan penelitian biasanya disesuaikan dengan profesi peneliti namun tidak menutup kemungkinan penelitian menggunakan multi disipliner.<sup>4</sup>

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

---

<sup>3</sup>S. Nasution, *Metode Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Transisto, 1996), h. 43.

<sup>4</sup>Muliati Amin, *Dakwah Jamaah (disertasi)* (Makassar, PPS. UIN Alauddin, 2010), h. 129.

### 1. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif adalah studi islam yang memandang masalah dari sudut legal formal dan atau normatifnya, maksud legal formal adalah hubungannya dengan halal haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya. Dan normatifnya adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash.

### 2. Pendekatan Sosio Kultural

Pendekatan sosio kultural menjelaskan sebuah cara dimana masyarakat dan budaya lingkungan mempengaruhi kelakuan. Pendekatan sosio kultural menyatakan bahwa pemahaman penuh dari tingkah laku seseorang membutuhkan pengetahuan tentang konteks lingkungan dimana kelakuan terjadi.

## C. *Sumber Data*

Adapun sumber data penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut:

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer sumber utama yang harus diwawancarai secara mendalam sebagai informan kunci.<sup>5</sup> Di dalam penelitian ini yang menjadi informasi lkunci (key informan) adalah pelaku *gerang* (gadai), dalam informan adalah masyarakat setempat.

### 2. Sumber Data Skunder

Data yang digunakan antara lain studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dan mempelajari dan mengutip teori serta konsep dari sejumlah literature berupa

---

<sup>5</sup>Maman dkk., *Metodologi Penelitian Agama:Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h.128.

buku, ensiklopedia, karya ilmiah, jurnal, majalah, Koran dan sebagainya yang didapatkan diberbagai perpustakaan. Atau pun memanfaatkan dokumen tertulis seperti gambar, foto atau benda-benda yang lain yang berkaitan dengan aspek yang diteliti.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan penelitian ini, penelitian yang menggunakan tiga metode pengambilan data, yaitu:

##### **1. Observasi**

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti<sup>6</sup>. Penggunaan metode observasi dalam penelitian di atas dipertimbangkan bahwa data yang dikumpulkan secara efektif apabila dilakukan secara langsung mengamati objek yang akan menjadi sasaran penelitian. Dengan metode observasi ini, bukan hanya hal yang didengar saja akan tetapi dapat dijadikan informasi serta gerakan-gerakan raut wajah pun mempengaruhi observasi yang dilakukan. Alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat, dan menganalisis secara sistematis. Sehingga dengan observasi ini peneliti akan mendapatkan data tentang bagaimana sistem *gerang* (gadai) di Adonara Barat.

##### **2. Wawancara**

Wawancara dapat didefinisikan sebagai “interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan dengan salah seorang, yaitu yang

---

<sup>6</sup> Husain Usman Poernama, *pengembangan teori dan praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h.54.

melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinan.<sup>7</sup>

Metode wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara mendalam dan wawancara terstruktur. Wawancara mendalam maksudnya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan, sehingga dengan wawancara mendalam data-data bisa terkumpul semaksimal mungkin. Sedangkan wawancara terstruktur maksudnya bahwa dalam penelitian ini, peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.<sup>8</sup>

Penelitian ini adalah orang-orang yang akan diwawancarai (sampel) adalah orang yang melakukan praktek *gerang* (gadai), Kepala Desa, Ketua Adat, dan masyarakat sekitar yang tidak melakukan praktek *gerang* (gadai).

### 3. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumentasi, notulen, catatan harian, dan sebagainya.<sup>9</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti dalam mengumpulkan data dengan teknik dokumentasi berarti peneliti melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang sifatnya teks menjelaskan dan menguraikan mengenai hubungannya dengan arah penelitian.

---

<sup>7</sup>Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.50.

<sup>8</sup>Muh. Khalifah Mustamin Dkk, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Makassare: UIN Press, 2009) h. 94-95.

<sup>9</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta:UGM Press, 1999), h.72.



Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam yaitu autobiografi, surat-surat pribadi, buku catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data deserver dan flashdisk, data tersimpan di website dan lain-lain.<sup>10</sup> Teknik ini digunakan untuk mengetahui sejumlah data tertulis yang ada di lapangan yang relevan dengan pembahasan penelitian ini.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Instrument utama dalam penelitian kualitatif adalah penelitian sendiri, yakni penelitian yang berperan sebagai perencana, menganalisis, menafsirkan data hingga pelaporan hasil penelitian. Barometer keberhasilan suatu penelitian tidak lepas dari instrument yang digunakan, karena itu instrument yang digunakan dalam penelitian lapangan ini meliputi: dokumentasi, wawancara (*interview*), kamera, alat perekam, dan buku catatan.

#### **F. Teknik Pengolahan dan Analisi Data**

Analisi data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta di lapangan, dengan demikian, analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian. Menurut Hamidi sebaiknya pada saat menganalisis data penelitian juga

---

<sup>10</sup>Penalaran UNM, *Metode Penelitian Kualitatif* "situs resmi penalaran, [http://www. penalaran-unm. org/index. php/artikel-nalar/penelitian/116-metode-penelitian, kualitatif. html](http://www.penalaran-unm.org/index.php/artikel-nalar/penelitian/116-metode-penelitian_kualitatif.html) (27 desember, 2016)

harus kembali lagi ke lapangan untuk memperoleh data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali.<sup>11</sup>

Data kualitatif adalah data yang bersifat abstrak atau tidak terukur seperti ingin menjelaskan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap nilai rupiah menurun. Oleh karena itu, dalam memperoleh data tersebut penulis menggunakan metode pengolahan data yang bersifat kualitatif, sehingga dalam mengolah data penulis menggunakan teknis analisis data sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan hasil penelitian di lapangan. Pada tahap ini dilakukan pemilihan tentang relevan tidaknya antara data dan tujuan penelitian.<sup>12</sup> Informasi dari lapangan sebagai bahan mentah diringkas, disusun lebih sistematis, serta ditonjolkan pokok-pokok yang penting sehingga lebih mudah dikendalikan.

#### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini, peneliti berupaya mengklarifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.

---

<sup>11</sup> Lihat Hamidi, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian* (Cet. III; Malang: UNISMUH Malang, 2005), h. 15.

<sup>12</sup> M. Manulang, *Pedoman Teknis Menulis Skripsi* (Yogyakarta:Penerbit, Andi, 2004), h.35.

### 3. Teknik Analisis Perbandingan (*Komparatif*)

Dalam teknik ini peneliti mengkaji data yang telah di peroleh dari lapangan secara sistematis dan mendalam lalu membandingkan suatu data dengan data yang lainnya sebelum ditarik sebuah kesimpulan.

### 4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Vervication*)

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman sebagaimana yang di tulis Sugiono adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikut.<sup>13</sup>

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis yang mana proses dan makna (*perspektik subjek*) lebih ditonjolkan karena landasan teorinya dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

---

<sup>13</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 253.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

##### 1. Kondisi Geografis

##### a. Batas Wilayah

Desa Duwanur merupakan salah satu Desa di Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur. Secara Geografis Desa Duwanur berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Batas Wilayah**

Batas Wilayah	Desa/Kelurahan
Utara	Laut Flores
Selatan	Desa/Kelurahan Waitukan
Timur	Kec. Adonara
Barat	Desa/ Kelurahan Homa

*Sumber: Publikasi Kecamatan Adonara Tahun 2018*

Dari tabel ini dapat diketahui bahwa Desa Duwanur memiliki batas wilayah di sebelah Utara adalah laut flores, disebelah selatan Desa/kelurahan Waitukan, disebelah Timur Kecamatan Adonara dan disebelah barat yakni Desa/kelurahan Homa.<sup>1</sup> Desa Duwanur Terletak 18 km dari ibu kota Kabupaten Flores Timur, dengan luas wilayah  $\pm 3.50 \text{ km}^2$  dan ketinggian di atas permukaan laut tinggi rata-rata 29 dpl

---

<sup>1</sup> Publikasi Kecamatan Adonara Barat kabupaten Flores Timur, 2018, h. 18.

(m). adapun letak Desa Duwanur berdasarkan titik kordinat terletak pada garis lintang selatan 8.26373 LS dan garis bujur timur 123.11259 BT.

b. Jumlah penduduk

Desa Dwanur berjumlah 1319 jiwa, berikut ini perbandingan jumlah penduduk Desa Duwanur dengan Desa-Desa dikecamatan yang ada di Kecamatan Adonara Barat<sup>2</sup>.

c. Mata Pencaharian

**Tabel 4.2**  
**Mata Pencaharian Penduduk Desa Duwanur Tahun 2018**

No	Mata Pencaharian	Volume	Satuan
1	Petani/perkebunan	215	Orang
2	Nelayan	200	Orang
3	Pedagang	15	Orang
4	PNS	13	Orang
5	Tukang	16	Orang
6	Guru	26	Orang
7	Bidan/Perawat	3	Orang
8	Pensiun	3	Orang
9	Sopir Angkut	12	Orang
10	Ojek	13	Orang
11	Jasa persewaan	14	Orang
12	Swasta	5	Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>535</b>	

*Sumber: Publikasi Kecamatan Adonara Tahun 2018*

<sup>2</sup>Publikasi Kecamatan Adonara Barat kabupaten Flores Timur, 2018, h. 31.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kondisi ekonomi masyarakat Desa Duwanur sebagian besar di topang oleh sektor pertanian dan nelayan, selain itu sumber pekerjaan yang lain diantaranya dagang, PNS, Tukang, Guru, Bidan dan lain sebagainya.

d. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penentu dalam melanjutkan dan melestarikan nilai-nilai hidup beragama baik dalam lingkungan pribadi maupun dalam lingkungan masyarakat. Sebab saat ini dan masa yang akan datang, pendidikan mendidikan menempati posisi yang sangat penting sehingga eksistensi pendidikan tersebut harus ditingkatkan mutu dan kualitasnya dimana aktifitas ditentukan oleh tingkat pendidikan masyarakat.

Pendidikan juga merupakan salah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya, dengan demikian maka akan membantu program pemerintah untuk membuka lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Sehingga dapat disimpulkam bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Duwanur cukup tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**Tabel 4.3**

**Tingkat Pendidikan Desa Duwanur Tahun 2018**

No	Tingkat Pendidikan	Volume	Satuan
1	Lulusan SD	185	Jiwa
2	Lulusan SLTP	30	Jiwa

3	Lulusan SLTA	20	Jiwa
4	S1/Diploma	15	Jiwa
5	Putus Sekolah	20	Jiwa
6	Buta Huruf	10	Jiwa
	<b>Jumlah</b>	<b>280</b>	

*Sumber: Publikasi Kecamatan Adonara Tahun 2018*

e. Tingkat keagamaan

**Tabel 4.4**  
**Tingkat Agama Desa Duwanur**

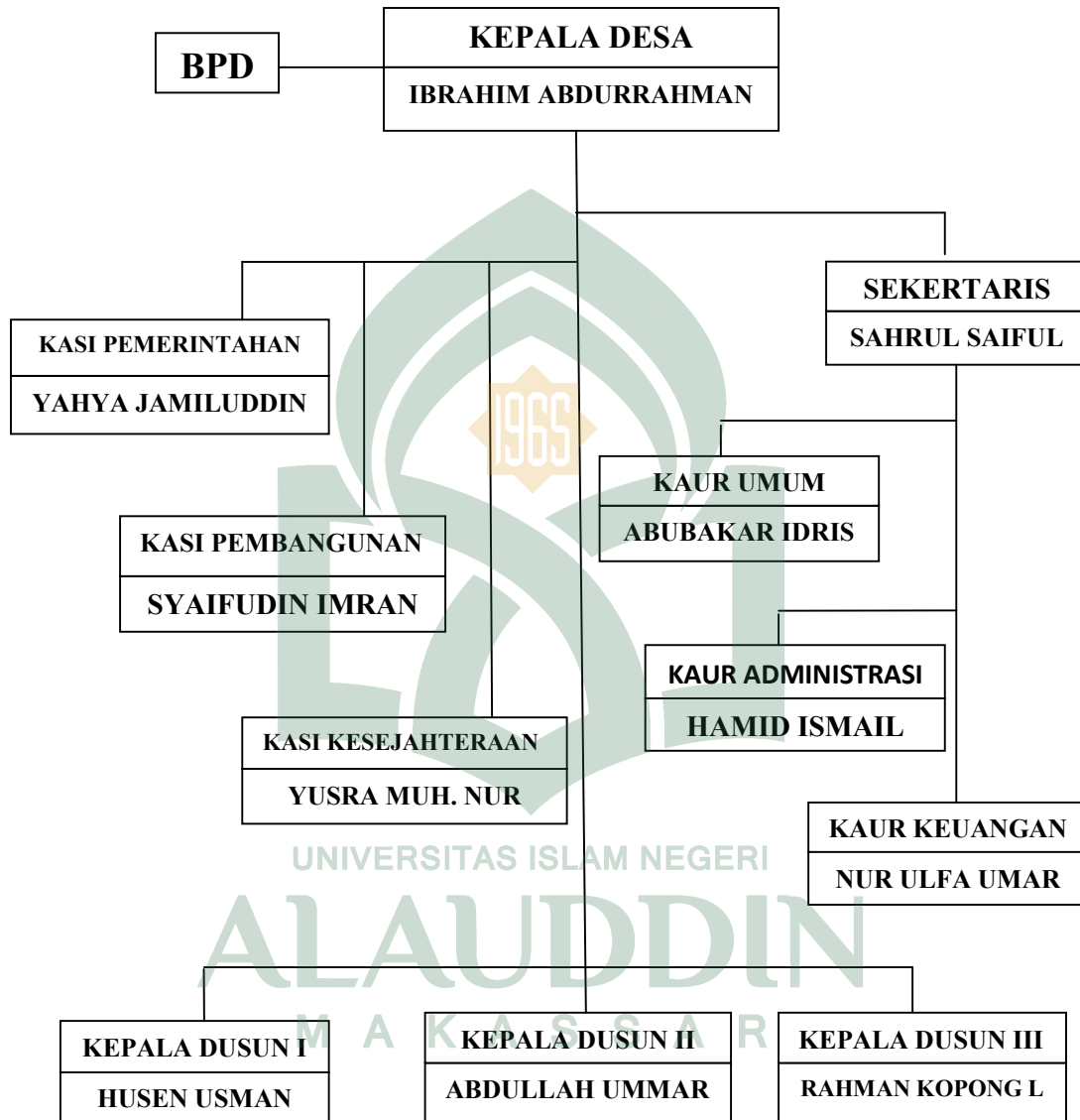
<b>Agama</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Satuan</b>
Islam	1319	Jiwa
Kristen	0	Jiwa
Hindu	0	Jiwa
Budha	0	Jiwa
Konghucu	0	Jiwa

*Sumber: Publikasi Kecamatan Adonara Tahun 2018*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dalam konteks keagamaan, masyarakat Desa Duwanur 100% adalah agama Islam. Akan tetapi tingkat pemahaman mereka tentang agama sangat minim, masih diperlukan peran tokoh-tokoh agama untuk meningkatkan pengetahuan tentang Islam secara menyeluruh.

## Struktur Organisasi Pemerintah Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat

### Kabupaten Flores Timur



*Sumber : Buku Profil Desa Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat 2018*



## **B. Faktor Yang Mendorong Masyarakat Desa Duwanur Memilih Gerang (Gadai)**

Faktor/motivasi yang melatar belakangi masyarakat lebih memilih *gerang* (gadai) kebun kelapanya kepada kerabat atau tetangganya sendiri dibandingkan menggadaikan kebun kelapanya pada lembaga atau bank.

### **1. Faktor Ekonomi**

Masyarakat Desa Duwanur melaksanakan transaksi gadai tersebut dikarenakan adanya suatu kebutuhan yang sangat mendadak dan tidak ada pilihan lagi selain menggadaikan hasil kebun kelapanya untuk mendapatkan uang dengan cepat. Seperti yang diungkapkan Bapak Ali Laga (*rahin*):

Kami ini Cuma mengharapkan uang dari hasil kelapa saja, kalo mau harap coklat sama tanaman lain itu tidak seberapa hasilnya, tapi hasil dari kelapa ini juga lama prosesnya baru jadi uang, jadi kalo ada kebutuhan mendadak terpaksa kami *gerang* sama tetangga karna lebih cepat dapatr uangnya dari pada mau pinjam di koprasi atau bank itu lama prosesnya baru banyak persyaratan<sup>3</sup>.

Seperti yang sudah penulis jelaskan bahwa pada umumnya masyarakat Desa Duwanur sebagian besar ditopang oleh sektor pertanian dan nelayan, selain itu sumber pekerjaan yang lain diantaranya dagang, PNS, tukang, guru dan lain sebagainya. Mereka beranggapan bahwa menggadaikan diperum pegadaian persyaratannya yang berbelit, keharusan melunasi uang pinjaman tepat pada waktunhya, sehingga membuat masyarakat Desa Duwanur merasa lebih cocok melakukan gadai kepada perorangan dari pada melakukan gadai kepada lembaga

---

<sup>3</sup>Ali Laga, Umur 51 Tahun, Masyarakat Desa Duwanur kecamatan Adonara Barat Kabupaten flores Timur, *Wawancara*, 18 september 2016.

yang dibuat oleh pemerintah sebab dengan begitu mereka bisa mendapatkan uang pinjaman dengan syarat yang tidak berbelit.

## 2. Faktor Sosio dan Kebiasaan.

Sesuai dengan informasi yang penulis dapat dari masyarakat Desa Duwanur dapat penulis simpulkan bahwa enggadaikan dan pemegang gadai keduanya saling mebutuhan, mereka yang menggadikan merasa sulit untuk memperoleh pinjaman dana yang cepat untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya atau mencukupi kebutuhan mendadak jika harus menggadaikan barang atau surat-surat berharga pada lembaga atau pun bank. Selain itu pinjaman uang harus dikembalikan tepat waktu kepa lembaga atau bank dengan disertai bunga yang besar, sehingga mereka lebih memilih menggadaikan kebun kelapa yang mereka miliki kepada kerabat atau tetangganya sendiri, meskipun mereka merasa dirugikan karena perjanjian pemanfaatan barang gadai tanpa batas waktu tapi mereka bisa mendapatkan uang dengan cepat tanpa menunggu lama proses dan syarat yang berbelit dan mereka bisa mengambil barang yang mereka gadaikan kapan pun sampai mereka mampu menebusnya kembali. Begitu pula bagi penerima gadai mereka juga membutuhkan barang gadai itu, untuk keperluan sehari-hari, itu sudah menjadi hukum adat pada masyarakat Desa Duwanur.

Oleh karena itu praktik gadai yang sering terjadi di masyarakat Desa Duwanur ini sudah menjadi adat kebiasaan dan sulit untuk dihilangkan meskipun dalam praktik gadai tersebut ada kerancuan mengenai barang yang digadaikan dan adanya unsur kecurangan dalam pemanfaatan barang gadai tanpa batas waktu namun mereka

berpedoman untuk saling percaya dan saling tolong menolong, hingga sampai saat ini mereka masih melakukan praktik *gerang* (gadai dengan cara seperti itu).

### **C. Sistem Pelaksanaan Gerang (Gadai) Yang Terjadi di Desa Duwanur**

Menurut masyarakat Desa Duwanur menyebutkan gadai dengan sebutan *gerang*. Menurut masyarakat Desa Duwanur *Gerang* (gadai) adalah perjanjian yang menyebabkan kebun kelapanya akan diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai dengan kesepakatan bahwa penggadai berhak mengambil kebun kelapanya setelah dia mampu melunasi hutangnya, dan selama penggadai belum mampu melunasi hutangnya maka kebun yang digadaikan dapat di ambil manfaatnya oleh penerima gadai, seperti yang diungkapkan bapak Hasim (*Murtahin*):

*Gerang* itu tidak pake batas waktu, kalo saya mampu lunasi hutang berarti kebun bisa saya ambil, kalo uang belum ada berarti kamu boleh makan saya punya kelapa (meanen kelapa) entah sampai 10 sampai 20 tahun tidak masalah, tapi kebun itu tetap jadi hak milik saya.<sup>4</sup>

Dari penjelasan Bapa Hasim, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Jika penggadai (*rahin*) belum mampu membayar lunas hutang-hutangnya maka penerima gadai (*murtahin*) berhak untuk tetap menahan dan mengambil hasil panen kelapa tersebut meskipun jumlah hasil panen yang di ambil sudah melebihi jumlah uang yang dipinjam. Adapun mengenai pelunasan tanpa batas waktu tertentu, asalkan uang sudah dikembalikan maka kebun kelapa yang digadaikanpun kembali menjadi hak pemiliknnya.

---

<sup>4</sup>Hasim, Umur 43 Tahun, Masyarakat Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur, *wawancara*, 15 september 2016.

Akan tetapi sistem yang semestinya tidak seperti yang dikatakan bapak hasim, dimana si penerima gadai (*murtahin*) dapat mengambil hasil panen sampai bertahun-tahun lamanya melebihi jumlah uang yang dipinjam, sebenarnya ada unsur kezoliman karena mereka mengambil hasil panen kelapa melebihi jumlah uang yang di pinjam dan kebun itu dikembalikan kepada pemiliknya setelah si penggadai (*rahin*) membayar lunas hutangnya dengan tunai bukan dihitung dari pengambilan hasil kebun kelapa tersebut. Seperti yang diungkapkan bapak Abdul Sukur:

Sistem *gerang* yang sesungguhnya tidak mengambil hasil panen hingga melebihi jumlah uang yang dipinjam, sistem yang sesungguhnya itu jika pemberi gadai (*murtahin*) sudah merasa cukup dengan jumlah uang yang dipinjam berarti kebun kelapa itu dikembalikan lagi oleh pemiliknya, namun hal itu hanya dijalankan oleh segelintir orang saja yang memang benar-benar paham tentang agama.<sup>5</sup>

Dari sekian banyak masyarakat Desa Duwanur hanya berapa orang yang melakukan sistem atau aturan *gerang* yang sesungguhnya dan mereka hanyalah orang-orang yang sangat paham tentang agama. Dan karena faktor kebiasaan masyarakatlah yang telah mengubah aturan/hukum sistem *gerang* yang sebenarnya maka sistem yang terjadi pada saat ini hanya memberi keuntungan kepada pemberi gadai (*murtahin*).

Ibu Mariam (*rahin*) mengungkapkan:

Kalo difikir-fikir sebenarnya saya rugi, karena saya Cuma pinjam Rp10.000.000 tapi hasil kebun kelapa saya diambil sudah 6 tahun ini, tapi tidak apa-apa to karena awal mereka mau bantu saya kasi pinjam uang.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Abdul Sukur, Umur 53 Tahun, Masyarakat Desa Duwanur kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur, *Wawancara*, 15 september 2016.

<sup>6</sup> Mariam, Umur 40 Tahun, Masyarakat Desa Duwanur kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur, *Wawancara*, NTT, 16 september 2016.

Jika dikalkulasikan yang sudah berlangsung selama enam tahun dengan luas kebun 1.000 m<sup>2</sup>, dan uang sebagai pinjaman Rp 10.000.000,- kemudian dihitung setiap kali panen  $\pm$  Rp 2.000.000,- sementara dalam satu tahun  $\pm$  2 - 3 kali panen maka jumlah keseluruhan uang yang di peroleh Rp4.000.000 – 6.000.000 pertahun. dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil dari panen kebun kelapa sudah bisa mengembalikan hutang yang dipinjam bahkan lebih.

Hal inilah yang kadang menimbulkan problematika karena barang jaminan gadai dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*). Penggadai (*rahin*) tidak diberi sedikitpun dari hasil keuntungan kebun kelapa oleh penerima gadai (*murtahin*). Hal ini terjadi karena menurut penerima gadai (*murtahin*) bahwa penggadai (*rahin*) tidak memiliki hak atas kebun kelapa yang dijadikan jaminan. Sehingga pemanfaatan atas kebun kelapa tersbut serta hasil panen kelapa sepenuhnya milik penerima gadai (*murtahin*). Namun ada juga masyarakat yang tidak merasa keberatandengan sisitem *gerang* yang berlangsung karena terkadang harga kopra turun seperti yang diungkapkan bapak Muktar lutfi (*rahin*);

Akhir-akhir ini harga kopra sangat turun, yang tadinya 1 kg itu bisa Rp10.000 atau Rp9000 sekarang turun sampai 4000, ya karena itulah lebih baik saya menggadaikan salah satu kebun kelapa yang saya miliki, kalo masalah tidak ada batas waktu dalam pengambilan manfaat barang gadai ya itu adalah resiko bagi saya, toh mereka juga sudah tolong saya kasi pinjam uang.

Masyarakat Desa Duwanur pada umumnya bermata pencaharian di sektor perkebunan, yang mana mereka mengandalkan hasil kebun kelapa, coklat, pisang,

jambu mente, dan masih banyak lagi, namun hasil yang paling menonjol adalah hasil dari kebun kelapa sehingga disaat harga kopra menurun Masyarakat Desa Duwanur akan merasa resah dan merasa sangat kesulitan untuk mendapatkan uang. Dari hasil tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya selain itu disisihkan pula untuk berjaga-jaga akan keperluan nantinya. Namun dalam keadaan mendesak seperti butuh biaya untuk sekolah anaknya, modal usaha, dan sebagainya. Mereka terpaksa menggadaikan hasil kebun kelapanya, dan kebun kelapa yang digadaikan adalah milik mereka sendiri. Seperti yang diungkapkan bapak Laga Oka (*rahin*):

Mata pencharian kami cuma berkebun, petik kelapa begini, tapi hasil kelapa juga lama prosesnya baru jadi uang, jadi kalo anak saya yang kuliah butuh uang banyak dan harus secepatnya dikirim, ya terpaksa kami gadaikan kebun kelapa sama tetangga atau sama keluarga sendir.<sup>7</sup>

Masyarakat di Desa Duwanur sudah terbiasa sejak zaman dahulu menggadaikan kebun kelapa, apabila ingin memenuhi kebutuhannya dan membutuhkan dana yang tidak sedikit mereka selalu mengadakan *gerang* (gadai), sehingga mereka beranggapan bahwa hal tersebut sudah menjadi kebiasaan, maka sudah menjadi ketetapan umum bila seseorang berhutang maka harus ada pegangan (jaminan) dengan demikian pihak yang membutuhkan dana tersebut mereka mendatangi orang-orang tertentu yang dianggap mampu menolongnya atau mampu menyelesaikan masalahnya, seperti yang diungkapkan Bapak Peu (*rahin*):

---

<sup>7</sup> Laga Oka, Umur 47 Tahun, Masyarakat Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Fkores Timur, *wawancara*, 17 september 2016.

Kami kalo mau pinjam uang langsung datang ke rumah tetangga atau keluarga yang mau kasi pinjam uang, misal saya pinjam uang 10.000 juta dengan jaminan luas kebun kelapa 1 hektar yang saya miliki, jika dia setuju maka perjanjian gerang itu dianggap sah meskipun tanpa ada perjanjian hitam di atas putih.<sup>8</sup>

Praktik gadai di Desa Duwanur terjadi ketika si penggadai mendatangi si penerima gadai dan menawarkan kebunnya sebagai jaminan dengan maksud meminjam sejumlah uang, jika si penerima gadai setuju maka dilakukanlah perjanjian gadai tersebut.

Proses terjadinya akad gadai hanya dilakukan secara lisan dengan asumsi adanya saling percaya diantara kedua belah pihak. Selain itu terkadang dihadirkan pihak lain yang akan menjadi saksi. Dan seperti yang telah diungkapkan di atas bahwa alasan mereka menggadaikan hasil kebun kelapanya adalah karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak diantaranya biaya sekolah, modal usaha dan lainnya. Namun kebanyakan dari mereka yang melakukan gadai dengan alasan biaya sekolah. Oleh karena itu mereka terpaksa menggadaikan kebun kelapanya tersebut.

Berikut adalah nama penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) di Desa Duwanur kecamatan Adonara Barat.

---

<sup>8</sup>Peu, Umur 47 Tahun, Masyarakat Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Fkores Timur, wawancara, NTT, 17 september 2016.

**Tabel 4.5**  
**Tabel Penggadai (*Rahin*) dan Penerima Gadai (*Murtahin*) Desa Duwanur**  
**Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur**

No	Rahin	Murtahin	Jumlah Hutang	Tujuan	Kelangsungan
1	Ali laga	Hasim	9.5 Juta	Biaya Kuliah	8 Tahun
2	Mariam	Abdul sukur	4 Juta	Biaya Kuliah	3 Tahun
3	Mukhtar Lubis	Kamsina	7 Juta	Pernikahan	5 Tahun
4	Laga Oka	Ali Masta	3,5 Juta	Biaya Berobat	2 Tahun
5	Peu	Marzuki	5 Juta	Biahya Kuliah	3 Tahun
6	Sahrul	Dahlan	10 Juta	Renovasi Rumah	6 Tahun
7	Faisal	Rahman	9 Juta	Pemakaman	2 Tahun
8	Zainuddin	Ilham	6 juta	Biaya Berobat	5 Tahun

#### ***D. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Geramg (Gadai) di Desa Duwanur***

Gadai dalam pandangan ekonomi Islam adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, dimana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda (jaminan) tersebut ketika pelunasan mengalami kesulitan.<sup>9</sup> Dengan kata lain seandainya sampai pada masa yang telah ditentukan si penggadai belum mampu melunasi hutang maka barang yang digadaikan di jual, jika terdapat kelebihan dalam penjualan tersebut di kembalikan kepada si penggadai, dan jika terdapat kekurangan maka wajib bagi penggadai melunasi kekurangan tersebut. Pinjam meminjam ini dibenarkan dalam QS al-Baqarah/2: 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً

<sup>9</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h. 288.



Terjemahnya:

jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang<sup>10</sup>.

Berdasarkan penjelasan konsep di atas dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan gadai kebun kelapa di Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur, pada perakteknya gadai di Desa Duwanur ada dua. Pertama gadai yang sifatnya sosial dengan maksud saling membantu penggadai (*rahin*). Kedua gadai yang bersifat komersial dengan maksud penerima gadai (*murtahin*) menerima gadai tersebut semata-mata ingin mengambil memanfaatkan atas kebun yang digadaikan.

Sementara itu berkenaan dengan ijab-qobul yang diucapkan oleh penggadai (*rahin*) dengan penerima gadai (*murtahin*) baik yang menggadaikan sifatnya sosial maupun komersial pada perinsipnya sama, yaitu rata-rata penggadai (*rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*) untuk meminjam uang dengan jaminan kebun kelapa sebagai jaminan. Seperti ijab-qobul yang dilakukan secara lisan oleh Bapak Ali Masta selaku penerima gadai penggadai (*murtahin*) “saya serahkan uang sebesar Rp9.000.000,- dan saya terima kebun kelapa tersebut. Ketika sudah terjadi akad ijab-qobul antara pennggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) maka kebun kelapa yang menjadi barang jaminan dimanfaatkan hasil panennya oleh penerima gadai (*murtahin*). Dilihat dari ijab-qobul yang dilaksanakan telah terjadi kekeliruan penafsiran/ pemahaman yaitu dalam pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai

---

<sup>10</sup>Kementrian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, h.49.

(*murtahin*) tanpa dibatasi waktu berakhirnya gadai tersebut. Hal ini bertentangan dengan rukun dan syarat sahnya gadai.

Dilihat dari segi rukunnya, menurut jumhur ulama bahwa rukun gadai ada empat, yaitu:

a. *Aqid* (*murtahin* dan *rahin*)

Pihak-pihak yang berakad dalam hal ini adalah *rahin* dan *murtahin* cakap menurut hukum yang ditandai dengan *aqid baliqh*, berakal sehat mampu melakukan akad.

Seseorang yang melakukan perbuatan hukum dalam melakukan gadai haruslah seseorang yang sudah balik atau dewasa. Yang dimaksud sudah dewasa adalah laki-laki yang sudah pernah bermimpi, dan bagi yang perempuan sudah mengeluarkan darah haid.

Penulis melakukan wawancara kepada pihak penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) disini rata-rata berumur 30-60 tahun.

Sedangkan yang dimaksud berakal disini adalah seseorang yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk dirinya. Apabila salah satunya dari keduanya baik penggadai (*rahin*) maupun penerima gadai (*murtahin*) tidak berakal maka transaksi tersebut tidak sah. Firman Allah SWT.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya:

janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai

pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.<sup>11</sup>

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh. Illat larangan tersebut ialah karena orang bodoh itu tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta sehingga orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan ijab dan qabul.

Seorang penggadai (*rahin*) maupun penerima gadai (*murtahin*) harus berpegang teguh pada etika Islam, diantara etika Islam, diantara etika Islam yang terpenting adalah seorang penggadai (*rahin*) maupun penerima gadai (*murtahin*) tersebut harus jujur, amanah untuk dirinya sendiri dan orang lain, memiliki sikap toleransi dalam bermuamalah, serta seorang penggadai (*rahin*) maupun penerima gadai (*murtahin*) harus memenuhi akad dan janji dalam bergadai.

Dalam perakteknya gadai di Desa Duwanur, kedua belah pihak baik penggadai (*rahin*) dan penerima gada (*murtahin*) yang melakukan akad gadai tersebut ialah seseorang yang berakal. Yakni mereka bisa membedakan mana yang baik dan mana yang bathil.

Tidak hanya baligh dan berakal, seseprang penggadai (*rahin*) ataupun penerima gadai (*murtahin*) juga harus melakukan akad (*al-ahliyyah*). *Al-ahliyyah* disini adalah *Al-ahliyyah bai'* (kelayakan, kepantasan, kompetensi melakukan jual beli). Setiap orang yang sah dan boleh untuk melakukan transaksi jual beli, maka sah dan boleh untuk melakukan akad gadai. Karena gadai adalah sebuah tindakan yang

---

<sup>11</sup> Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 77

berkaitan dengan harta seperti jual beli. Oleh karena itu, kedua belah pihak yang melakukan akad gadai harus memenuhi syarat-syarat orang yang sah melakukan transaksi jual beli.

Menurut pandangan ekonomi Islam mengenai pemahaman barang gadai oleh *murtahin*. Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya kecuali dengan seizin pemilik barang (*rahin*). Dalam hal ini masyarakat Desa Duwanur beranggapan bahwa dalam sistem gadai *murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai, sehingga pada awal akad *rahin* telah menyerahkan dan mengizinkan untuk di ambil hasil kebun kelapanya oleh *murtahin*. Namun disisi lain menurut ulama Malikiyah, manfaat atau nilai tambah yang datang dari barang jaminan adalah milik *rahin* dan bukan untuk *murtahin*. Tidak boleh mensyaratkan pengambilan manfaat dari barang jaminan, karna larangan tersebut hanya berlaku pada utang piutang.<sup>12</sup> Adapun pada perjanjian gadai, mereka memberi kelonggaran kepada *murtahin* untuk memanfaatkan barang jaminan selama waktu pengambilan manfaat yang telah disyaratkan “harus ditentukan batas waktunya”, apabila tidak ditentukan maka syarat gadai batal.

Batas waktu jatuh tempo mengenai pemanfaatan hasil kebun kelapa di Desa Duwanur yakni pada saat tiba waktunya jatuh tempo dan *rahin* belum belum mampu untuk melunasi hutangnya, pihak *murtahin* tetap memanfaatkan dan melanjutkan gadai kebun kelapa tersebut dan tidak ada penuntutan terhadap *rahin* untuk menjual

---

<sup>12</sup> Muhammad Dan Sholikhulm Hadi, *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Pegadaian Nasional, Edisi I*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 70.

kebun tersebut. Sedangkan dalam pandangan ekonomi Islam seharusnya pada saat telah jatuh tempo dan *rahin* belum mampu melunasi hutangnya maka *murtahin* berhak untuk menuntut kebun kelapa (marhun) tersebut untuk dijual, dan jika *rahin* tidak mau menjualnya. Maka, *Murtahin* boleh menyelesaikan melalui jalur hukum.

Mengenai pelunasan tanpa batas waktu tertentu, asalkan uang sudah dikembalikan maka kebun yang digadaikan pun kembali menjadi hak pemiliknya, dalam hal ini ekonomi Islam berpandangan bahwa seharusnya ada batas waktu yang ditentukan pada saat *sighat* (serah terima) supaya nantinya lebih memudahkan si *rahin* dan *murtahin* dalam menyelesaikan gadai kebunnya.

Di Desa Duwanur baik penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) jika dilihat dengan kasat mata maka semuanya sudah bisa dibilang mampu melakukan akad. Hal ini didasari pada saat mereka melakukan interaksi jual-beli dengan mensyaratkan baik dipasar, toko dan lain sebagainya. Jadi, penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) boleh melakukan transaksi gadai.

*b. Marhun* (barang gadai)

*Marhun* adalah harta yang dipegang oleh penerima gadai (*murtahin*) atau wakilnya, sebagai jaminan hutang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan, yang ketentuannya jaminan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam, jaminan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang, jaminan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik), jaminan itu sah milik penggadai (*rahin*) dan tidak

terikat dengan hak orang lain. jaminan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat, barang gadai yang dijadikan jaminan di Desa Duwanur adalah kebun kelapa, kebun kelapa memiliki nilai ekonomis, jadi sah saja penggadai (*rahin*) menggadaikan kebun kelapanya kepada penerima gadai (*murtahin*).

c. *Marhun Bihi* (pinjaman hutang)

Pinjaman hutang diserahkan pada saat pelaksanaan akad gadai. Yakni penerima gadai (*murtahin*) menyerahkan uang pinjaman dan (*rahin*) menyerahkan kebun kelapa secara lisan. Besarnya sesuai kesepakatan antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*).

d. *Sighat* (akad gadai)

Menurut konsep hukum Islam, ijab dan qobul adalah *sighat al-aqdi*, atau perkataan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak. Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam *sighat*, diantaranya: lafadz yang dipakai untuk ijab dan qabul harus terang pengertiannya,

Di dalam kesepakatan yang terjadi antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) saat berakad seperti yang telah dilakukan Bapak Faisal (*rahin*) dengan Bapak Rahman (*murtahin*) di Desa Duwanur, justru terdapat kerancuan yang terjadi yakni ketika akad diucapkan tidak ada batasan waktu yang ditentukan sampai kapan akad gadai itu berlangsung dan selama akad gadai berlangsung hak pemanfaatan barang gadai berada ditangan penerima gadai (*murtahin*) sampai penggadai (*rahin*) bisa melunasi hutangnya. Sementara disisi lain menurut ulama Malikiyyah, manfaat atau nilai tambahan yang datang dari barang jaminan adalah

milik si penggadaai (*rahin*) dan bukan penerima gadai (*Murtahin*). Tidak boleh mensyaratkan pengambilan manfaat dari barang jaminan, karna larangan tersebut hanya berlaku pada utang piutang. Adapun pada perjanjian gadai, mereka memberi kelonggaran kepada penerima jaminan untuk memanfaatkan barang jaminan, jika pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari *marhun* diperuntukan pada dirinya maka waktu pengambilan manfaat yang telah disyaratkan “harus ditentukan batas waktunya, apabila tidak ditentukan maka syarat gadai batal”.<sup>13</sup> hukum mengenai manfaat atau nilai tambahan yang datang dari barang jaminan adalah milik si penggadaai (*rahin*) dan bukan penerima gadai (*Murtahin*). Hal ini dipertegas dalam hadis Nabi Saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ  
الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ (رَوَاهُ الدَّارُقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ)

Artinya:

Dari Abu Hurayrah r.a., katanya: Rasulullah saw bersabda, “janganlah gadai itu ditutup dari pemilik yang menggadaikannya, ia berhak memperoleh bagiannya dan kewajiban (membayar) utangnya.” (HR. al-Daruquthni dan al-Hakim)<sup>14</sup>

Berdasarkan hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa *marhun* itu hanya sebagai jaminan atau kepercayaan atas *murtahin*. Kepemilikan *marhun* tetap melekat pada *rahin*. Oleh karna itu manfaat atau hasil dari *marhun* itu tetap berada pada *rahin* kecuali manfaat atau hasil dari *marhun* itu diserahkan kepada *murtahi*. Selain itu, perlu diungkapkan bahwa pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* yang mengakibatkan turun kualitas *marhun* tidak dibolehkan kecuali diizinkan oleh *rahin*.

<sup>13</sup> Muhammad Dan Sholikhulm Hadi, *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Pegadaian Nasional, Edisi I*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 70.

<sup>14</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jilid V (Jakarta: Gema inani: 2011), h. 182.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan, bahwa jaminan dalam gadai menggadai itu berkedudukan sebagai kepercayaan atas utang bukan untuk memperoleh laba, jika membolehkan mengambil manfaat kepada orang yang menerima gadai berarti membolehkan mengambil manfaat kepada bukan pemiliknya, sedangkan yang demikian itu tidak dibenarkan oleh syara'. Selain dari pada itu apabila penerima gadai mengambil manfaat dari barang gadai, sedangkan barang gadaian itu sebagai jaminan utang, maka hal ini termasuk kepada menguntungkan yang mengambil manfaat, dimana Rasulullah saw telah bersabda:

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنُفْعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرَّبَا.

Artinya:

Dari fadhlah ibn ubaid sahabat Nabi Saw., sesungguhnya Nabi berkata: “semua utang piutang yang mendatangkan manfaat adalah salah satu bentuk dari riba”.<sup>15</sup>

Dengan demikian jelaslah imam malik berpendapat bahwa manfaat dari barang jaminan itu adalah hak yang menggadaikan (*rahin*) dan bukan hak penerima gadai (*murtahin*), akan tetapi penerima gadaipun dapat memanfaatkan barang gadai dengan ketentuan syarat yang telah disepakati.

Sama dengan pendapat imam syafi'I dan Maliki, dan Hambaliyah dalam masalah ini memperhatikan kepada barang yang digadaikan itu sendiri, apakah yang digadaikan itu hewan atau bukan, dari hewanpun dibedakan pula antara hewan yang dapat diperah atau ditunggangi. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah Saw:

---

<sup>15</sup> Imam al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid III (tt: Syarikah Nur Asiah 1981), h. 115.



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِفَقْتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوًّا نَا وَلَيْتَ الدَّرَّ يُسْرَبُ بِفَقْتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوًّا وَعَلَى الَّذِي يُرْكَبُ وَيُسْرَبُ النَّفَقَةُ (رَوَاهُ الْبُجَارِيُّ)

Artinya;

Dari Abu Hurayrah r.a., katanya: Rasulullah saw. Bersabda, “Binatang yang digadaikan boleh ditunggangi dengan diberikan biaya jika ia gadaikan dan susu binatang boleh diminum dengan diberikan biaya jika digadaikan. Orang yang mengendarai binatang itu dan meminum susunya diharuskan membayarkan biayanya”.<sup>16</sup>

Hadis tersebut menjelaskan bolehnya memanfaatkan hewan yang digadaikan dengan menaiki dan memerah susunya sesuai dengan kadar pemberian makanan kepada hewan tersebut, maka mereka menginterpretasikannya dalam konteks jika rahin tidak bersedia untuk memenuhi biaya kebutuhan *marhun*, sehingga yang memenuhi biaya kebutuhan *marhun* adalah *murtahin*.<sup>17</sup>

Kutipan tersebut dapat dipahami bahwa penerima gadai (*murtahin*) tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian kecuali hewan yang bisa ditunggangi dan dapat diperah susunya, sedangkan apabila barang gadai yang tidak bisa ditunggangi seperti rumah, kebun, sawah dan sebagainya, maka penerima gadai (*murtahin*) tidak boleh mengambil manfaatnya.

Sejauh pengamatan dan melakukan wawancara kepada penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) gadai di desa Duwanur kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur pada pelaksanaannya dalam melakukan akad *Gerang* hanya dengan lisan saja tidak tertulis. Hal tersebut pada dasarnya telah mengikat para pihak

<sup>16</sup>Idris, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, h.204.

<sup>17</sup>Safriyal, *Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Profinsi Aceh)*, Jurnal Ilmiah Islam Futura Vol.15. No.2 (Aceh : Februari 2016), h. 241.

dan sah. Namun untuk lebih afdhal maka seharusnya akad *rahn* yang dilakukan harus ditulis dan diikrarkan selanjutnya disaksikan oleh para saksi dan diketahui oleh pihak yang berwewenang dalam hal ini kepala Desa. Selain itu pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai (*murtahin*) dan juga gadainya tidak dibatasi sampai kapan gadai itu berakhir, hanya saja ketika si penggadai (*rahin*) sudah ada uang dan bisa melunasi hutangnya maka secara otomatis barang gadai dapat di ambil kembali dan akad gadai berakhir, merujuk pada pendapat ulama Malikiyyah yang mengatakan ketidakjelasan (*jahaalah*) syarat akad, maka gadai yang seperti itu tidak sah.

Berdasarkan penjelasan hasil wawancara tersebut dapat dianalisis bahwa praktek gadai kebun kelapa yang dilakukan di Desa Duwanur Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur jika dilihat dari rukun dan syarat sahnya akad tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam. ketidaksaahan akad terjadi pada *sighat* akad, ketika ijab qabul diucapkan tidak ada batasan waktu yang ditentukan sampai kapan akad itu berlangsung, bahwa akad gadai tidak sah ketika pihak penerima gadai (*murtahin*) memanfaatkan barang gadai (*marhun*). Jangka waktu pengambilan manfaat harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya akan melahirkan ketidak-adilan, maka menjadi tidak sah. Pemanfaatan yang berlarut-larut oleh penerima gadai (*murtahin*) mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. Hal ini bertentangan dengan hukum islam yang mengharuskan penguasaan/ pemanfaatan berada ditangan penggadai (*rahin*). Dan jika hal ini dibiarkan maka orang kaya akan memanfaatkan kekayaannya untuk mendapatkan jaminan gadai dari orang yang kurang mampu untuk investasi yang terus berkembang.

## BAB V

### PENUTUP

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis meneliti dan menganalisis pelaksanaan gadai kebun kelapa (*gerang*) di Desa Duwanur maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada beberapa faktor yang mendorong masyarakat lebih memilih sistem *gerang* (gadai) yakni faktor Ekonomi dan kebiasaan, dimana masyarakat Desa Duwanur melaksanakan transaksi *gerang* (gadai) kebun kelapa dikarenakan adanya suatu kebutuhan yang mendadak dan tidak ada pilihan lagi selain menggadaikan kebun kelapanya, prakti *gerang* (gadai) ini sudah menjadi adat kebiasaan dan sulit untuk dihilangkan meskipun dalam sistem *gerang* (gadai) tersebut ada kerancuan dalam pemanfaatan barang gadai tanpa batas waktu namun mereka berpedoman untuk saling percaya dan saling tolong menolong, hingga sampai saat ini mereka masih melakukan praktik gadai tersebut.
2. Proses gadai hanya dilakukan secara lisan, yaitu pihak *rahin* mendatangi dan menawarkan kebun kelapanya kepada *muertahin* untuk digadaikn dengan maksud untuk memperoleh pinjaman sejumlah uang, dari pertemuan tersebut *rahin* dan *muertahin* mengadakan kesepakatan meski tanpa adanya perjanjian tertulis.

3. Pelaksanaan gadai kebun kelapa di Desa Duwanur menurut pandangan ekonomi Islam jika dilihat dari rukun dan syarat gadai sudah terpenuhi. Akan tetapi jika dilihat dari segi *sighat* (penentuan batas waktu) yang tidak dipermasalahkan. Sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban gadai dalam ekonomi Islam belum terpenuhi seperti; Apabila telah jatuh tempo dan *rahin* tidak mampu melunasi hutangnya, maka *murtahin* berhak menjual barang gadai (*marhun*) tersebut. Sedangkan sistem gadai yang terjadi di Desa Duwanur tidak ada penjualan kebun kelapa meskipun telah jatuh tempo. Dan *murtahin* tetap memanfaatkan hasil panen kebun kelapa tersebut. Tidak adanya penjualan kebun kelapa (barang gadai), karna *rahin* memang tidak ingin menjualnya. Oleh karena itu pelaksanaan gadai kebun kelapa (*gerang*) di Desa Duwanur belum sepenuhnya sesuai dengan ekonomi Islam.

#### **B. Implikasi Penelitian**

1. Hendaklah para pemuka masyarakat dalam hal ini adalah para ulama setempat, agar lebih sering memberikan pengarahan atau informasi mengenai pelaksanaan gadai yang sesuai dengan ekonomi Islam dan tentang cara-cara bermuamalah secara baik dan benar sehingga masyarakat dapat terhindar dari kesalahan.
2. Kepada *Rahin* dan *Murtahin*, selain kepercayaan yang mereka miliki bersama, hendaklah dalam bertransaksi gadai kebun kelapa (*gerang*) menggunakan catatan yang ditanda tangani oleh kedua belah dibawah notaris sebagai bukti otentik jika diantara mereka terjadi perselisihan.

3. Hendaknya dalam bertransaksi gadai kebun kelapa (*gerang*) selain melibatkan pihak ketiga (saksi) juga melibatkan pihak pemerintah seperti Kepala Desa dan mengarsipkannya. Agar dikemudian hari, apabila terjadi perselisihan lebih mudah menyelesaikannya.
4. Sebagai bahan pembelajaran atau ilmu pengetahuan yang dapat diterapkan oleh pembaca dalam melaksanakan gadai khususnya gadai kebun kelapa (*gerang*).



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, *Konfigurasi Akad Dalam Islam*, Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar.
- Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group 2012.
- Ade Tri Cahyani, Fakultas Syariah dan Hukum universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakatkecamatan Tapos Kota Depok*, Jakarta:2015.
- Amin Muliati, *Dakwah Jamaah (disertasi)* Makassar, PPS. UIN Alauddin, 2010.
- Amiruddin Kadir, *Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Alauddin University press.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada 2015.
- Ash-Shiddieqy Teungku Muhammad Hasbi, *Koleksi Hadits-hadits Hukum 3*. Semarang: Pustaka Rizki Putra 2011.
- Basyir Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, edisi revisi, Yogyakarta: UII Pers, 2000.
- Cahyani Tri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kec. Topas kota Demak”, *Skripsi*, Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Quran, 1986.
- Endarsawara Suwardi, *Penelitian Kebudayaan: Idiologi, Epistimologi Dan Aplikasi*, Yogyakarta:Pustaka Widyatama,2006.
- Hadi Abu Azam Al, *Fikih Muamalah Kontenporer*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Hadi Muhammad Solikhul, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Idris, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada 2016.
- Imam Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiran bin Bardizbah Al-Bukhari Al-ju'fiy, *Shahih Al-Bukhari*, Juz III , Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1996.
- J Lexy, Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* , Bandung: Remaja Kerta Karya, 1998.
- Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Lastuti Abu Bakar, Pranata Gadai Sebagai Alternatif Pembiayaan Berbasis Kekuatan Sendiri , Vol. 24 No.1, Feb 2012.
- Lihat Hamidi, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, Cet.III;Malang:UNISMUH Malang,2005.
- M. Manulang, *Pedoman Teknis Menulis Skripsi* (Yogyakarta:Penerbit.Andi, 2004.
- Maman, dkk., *Metodologi Penelitian Agama:Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Muhammad dan Sholikhulm Hadi, *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Pegadaian Nasional, Edisi I*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Muttaqin Imamil, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang”, *Skripsi*, Sarjana Fakultas Agama islam Universitas muhammadiyah Surakarta, 2015.
- Nasution, *Metode Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Transisto, 1996.
- P3EI, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014.
- Patrik Purwahid Dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Semarang: Fakultas Hukum Undip, 2003.
- Penalaran UNM, *Metode Penelitian Kualitatif*”situs resmi penalaran, <http://www.penalaran-unm.org/index.php/artikel-nalar/penelitian/116-metose-penelitian,kualitatif.Html>, 27 desember, 2016.
- Poernama Husain Usman, *pengembangan teori dan praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rozalinda, *Fikih ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Safrizal, *Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari’ah (Studi Kasus Di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Profinsi Aceh)*, Jurnal Ilmiah Islam Futura Vol.15. No.2, Aceh : Februari 2016, h. 241.
- Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta :Penadamedia Group, 2009.
- Sofwan Sri Soedewi masjchoen, *Hukum Perdata: Hukum Bend*, Cet. Ke-5, Yogyakarta; Liberty, 1974.
- Sudarsono Heri, *bank. dan lembaga keuangan syariah deskripsi dan ilustrasi*, Yogyakarta:pt. ekonsia, 2003.
- Sugiono,*Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyanto, *Statistik Untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2006.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Sukamadinata Nana Syaodin, *Pengembangan Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* , Yogyakarta:UGM Press, 1999.
- Syafei Rachmat , *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Umam Khotibul, *Perbankan Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada 2016.
- Wardi Muslich Ahmad, *Fiqh Muamalah*, jakarta: Amzah, 2013

The logo of Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar is a large, light green emblem. It features a central yellow star with the year '1965' inside. The star is surrounded by a green archway, and the entire emblem is set against a background of green geometric shapes.

# **LAMPIRAN –LAMPIRAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



## PEDOMAN WAWANCARA

1. Pemahaman *gadai* secara umum menurut masyarakat setempat.
2. Tujuan sistem *gerang*.
3. Sejarah sistem *gerang* ini dilakukan.
4. Mekanisme sistem *gadai* di Kecamatan Adonara Barat.
5. Jangka waktu pelunasan utang dalam sistem *gerang*.
6. Kebijakan dari *murtahin* jika *rahi* tidak sanggup membayar utangnya.
7. Faktor apa yang mendorong masyarakat lebih memilih transaksi *gerang*?
8. Bagaimana tanggapan *rahi* mengenai manfaat yang di ambil oleh *murtahin*?
9. Tanggapan penggadaim mengenai konsekuensi yang akan diterima selama hasil diambil, tanpa batas waktu?



*Gambar 1:* kantor Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur



Wawancara dengan Bapak Ali Masta (*murtahin*)



Wawancara dengan Bapak Peudan Bapak Faisal (*Rahin*)



Wawancara dengan Ibu Mariam (*rahin*)





Wawancara dengan Ibu Kamsina (Murtahin)



Wawancara dengan Bapa Hasim (Murtahin)



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 755 Tahun 2018

TENTANG

PEMBIMBING/PEMBANTU PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA  
JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar **Ida Rohana** : 90100114119 Tertanggal 22 Januari 2018 untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi dengan Judul: "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Neraang (Gadai) Di Desa Cawerian Kec. Adonara Barat"
- Menimbang** : a. Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan pembimbing/ pembantu pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing/pembantu pembimbing menyusun skripsi mahasiswa tersebut diatas
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status Institute Agama Islam Negeri Alauddin Makassar menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Pertama** : Mengangkat / Menunjuk Saudara :
1. **Dr. Drs. Urbanus Uma Leu, M.Ag**
2. **Mustofa Umar, S.Ag.,M.Ag**
- Kedua** : Tugas Pembimbing/ Pembantu Pembimbing dalam Penelitian dan Penyusunan Skripsi Mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa  
Pada tanggal : 20 Maret 2018

Dekan,

PROF. DR. H. AMBO ASSE, M.Ag  
NIP. 19581022 198703 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Kampus I : Jl. Sri Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax. 864923  
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Lempu No.36, Remangpolong – Gowa Tlp. (0411) 841879 Fax. (0411) 8221400

Nomor 5671/EB.I/PP.00.9/08/2018

Samata, 24 Agustus 2018

Lampiran

Hal

**Undangan Seminar Proposal**  
90100114119/Ida Rohana

Kepada Yth :

1. Drs, Urbanus Irma Leu, M.Ag. Sebagai Pembimbing I
2. Mustafa Umar, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing II

Di-

Tempat

Assalamu'Alaikum Wr. Wb

Bersama ini kami mengundang bapak untuk menghadiri Seminar dan melaksanakan serta bertindak selaku Pembimbing pada Seminar Draft Skripsi yang InsyaAllah akan dilaksanakan pada

Hari Tanggal

Jumat 24 Agustus 2018

Waktu

09.00 - 12.00

Judul Skripsi

Sistem Nerang (Gadai) Dalam Perspektif Islam Kecamatan  
Adonara Barat Kabupaten Flores Timur

Tempat

Ruang Seminar

Atas segala perhatian dan kehadirannya diucapkan banyak terimakasih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALAUDDIN**  
MAKASSAR



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag

NIP. 19531022 198703 1 002



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Kampus I : Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864928 Fax 864923  
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata - Gowa Tlp. 841879 Fax 8221400

Nomor : 6925 /EB.1/PP.00.9/11/2018  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Hal : Undangan Seminar Hasil

Samata, 4 November 2018

Kepada Yth  
Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing  
Di-  
Makassar

**Assalamu Alaikum Wr. Wb.**

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Seminar Hasil Penelitian Mahasiswa:

Nama : Ida Rohana  
NIM : 90100114119  
Jurusan : EKONOMI ISLAM  
Judul Skripsi : Sistem gerang atau gadai dalam perspektif Islam di Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur  
Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 15 November 2018  
Waktu : 10.00 - 11.00 WITA  
Tempat : Ruang Seminar

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Dekan,



UNIVERSITAS ISLAM Negeri Alauddin Makassar  
Prat. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.  
NIP. 195810221987031002

**ALAUDDIN**  
**M A K A S S A R**





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Kampus I : Jl. Sh. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864928 Fax 864923  
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa - Gowa Tlp. 841879 Fax 8221400

Nomor : *7995* /EB.1/PP.00.9/11/2018  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Hal : **Undangan Ujian Munaqasyah**

Samata, 22 November 2018

Kepada Yth

Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing  
Di-

Makassar

**Assalamu Alaikum Wr. Wb.**

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Ujian  
Munaqasyah Mahasiswa:

Nama : Ida Rohana  
NIM : 90100114119  
Jurusan : EKONOMI ISLAM  
Judul Skripsi : "Sistem gerang atau gadal dalam perspektif Islam di Desa  
Duwanur Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores  
Timur"

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 23 November 2018  
Waktu : 09.00 - 12.00 Wita  
Tempat : Ruang Seminar

Demikian atas perhatiannya kami diucapkan terima kasih.

Wassalam  
Kuasa Dekan,  
Nomor: 7028/EB.1/Kp.07.6/11/2018  
Tanggal, 19 November 2018

*[Signature]*  
Dr. H. Abd. Wahab, S.E., M.Si.  
NIP. 19720421 200801 1 006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 1864 TAHUN 2018

TENTANG

PANITIA DAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA  
A.n.Ida Rohana, NIM : 90100114119  
JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, **Ida Rohana, NIM: 90100114119** untuk melaksanakan seminar hasil.
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia dan tim penguji seminar hasil dan penyusunan skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;  
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;  
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;  
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama RI No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Membentuk Panitia dan Tim Penguji Seminar hasil, Jurusan **EKONOMI ISLAM** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.  
Sekretaris : Dr. Hj. Rahmawati Muin, M.Ag.  
Pembimbing : Dr. Urbanus Uma Leu, M.Ag.  
Pembimbing II : Mustafa Umar, S.Ag., M.Si.  
Penguji I : Dr. Tahir Maleko, M.Hi.  
Penguji II : Ismawati, SE., M.Si.  
Pelaksana : Roshani

1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
2. Biaya pelaksanaan seminar hasil penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Kedua : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa  
Pada tanggal : 14 November 2018  
Dekan

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.  
NIP. 19581022 198703 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan He Nepo Telp. ( 0383 ) 21014, Fax ( 0383 ) 21994  
**LARANTUKA**

**SURAT KETERANGAN / REKOMENDASI**  
**UNTUK MENGADAKAN SURVEY / RESEARCH**  
NOMOR : BKBP. 070 / 244 / Sekret / 2018

Membaca : Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Univ. Islam Negeri Alauddin Makassar, Nomor : 5783/EB.I/PP.00.9/8/2018, Tanggal : 28 Agustus 2018, Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;

Menerangkan : **TIDAK BERKEBERATAN**

Nama : **IDA ROHANA**  
NPP/NIM : **90100114119**  
Pekerjaan : **Mahasiswa**  
Untuk : **Melakukan Penelitian**  
Judul : **"SISTEM NERANG (GADAI) DALAM PERSPEKTIF ISLAM DI DESA DUWANUR KECAMATAN ADONARA BARAT KABUPATEN FLORES TIMUR"**  
Lokasi Penelitian : **Desa Duwanur, Kecamatan Adonara Barat - Kab. Flores Timur.**  
Lama Penelitian : **2 (dua) Minggu**

**DENGAN KETENTUAN :**

1. Wajib melaporkan maksud dan tujuan Penelitian kepada Pemerintah setempat;
2. Selama mengadakan Penelitian tidak dibenarkan untuk melakukan kegiatan di bidang lain;
3. Berbuat positif, tidak dibenarkan melakukan hal – hal yang mengganggu ketertiban masyarakat;
4. Rekomendasi ini akan batal, apabila pemegangnya tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya dan diminta agar INSTANSI PEMERINTAH / SWASTA yang dihubungi dapat memberikan bantuan / fasilitas kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

Larantuka, 10 September 2018

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Flores Timur

Sekretaris

**ANDREAS MATUTINA, S.FIL., MM**

AKSES PEMBINA TK. I

NIP. 19690209 199903 1004

**Tembusan :**

1. Bupati Flores Timur, di Larantuka (sebagai laporan).
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Univ. Islam Negeri Alauddin di Makassar
3. Camat Adonara Barat, di Waiwacan.



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
KECAMATAN ADONARA BARAT  
WAIWADAN**

Jln. Trans Waiwadan – Buser, No. – Telpn. – Fax. – Kode Pos : 86262

**SURAT KETERANGAN / REKOMENDASI  
UNTUK MENGADAKAN PENELITIAN**

Nomor: Kec. AB. 070 / 638 / Pelum Kesos / 2018

Dasar surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Flores Timur, Nomor BKBK.070 / 244 / Sekret / 2018, Tanggal : 10 September 2018, Perihal : Surat Keterangan / Rekomendasi Untuk Mengadakan Survey / Research, maka Camat Adonara Barat dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : IDA ROHANA  
N I M : 90100114119  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Untuk : Melakukan Penelitian  
Judul : “ **SISTEM NERANG ( GADAI ) DALAM PERSPEKTIF ISLAM DI DESA DUWANUR KECAMATAN ADONARA BARAT KABUPATEN FLORES TIMUR** ”.  
Lokasi Penelitian : Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur  
Lama Penelitian : 2 ( Dua ) Minggu

Demikian Surat Keterangan / rekomendasi ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya dan dimohon agar INSTANSI PEMERINTAH / SWASTA yang dihubungi dapat memberikan bantuan / fasilitas kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Waiwadan, 12 September 2018

Camat Adonara Barat,

  
**WILHELMUS WISOK MANGU, SH**  
Pembina TK. I  
NIP. 19660422 199312 1 002

**Tembusan :**

1. Bupati Flores Timur di Lantuka.
2. Kepala Badan KESBANGPOL Kabupaten Flores Timur di Lantuka.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Univ. Islam Negeri Alauddin di Makassar.
4. Kepala Desa Duwanur di Duwanur.





**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
KECAMATAN ADONARA BARAT  
DESA DUWANUR**

Alamat : Waikewak, Desa Duwanur Kec. Adonara Barat Kab. Flores Timur Prov. Nusa Tenggara Timur; 86862.

**SURAT KETERANGAN  
TELAH MENYELESAIKAN PENELITIAN**  
Nomor : Dnr.120/670/IX/Pem/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini kepala desa Duwanur, dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Ida Rohana  
Nim : 90100114119  
Jabatan : Mahasiswa  
Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

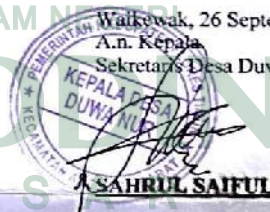
Yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian mulai tanggal 12 September 2018 s/d 25 September 2018 di Desa kami, untuk menyusun skripsi dengan judul **"Sistem Nerang (Gadai) Dalam Perspektif Islam di Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur"** sebagai kelengkapan untuk menyelesaikan studi S1 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Waikewak, 26 September 2018

A.n. Kepala

Sekretaris Desa Duwanur



**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

**Tembusan :**

1. Camat Adonara Barat di Waikewak
2. Kepala KESBANGPOL Kabupaten Flores Timur di Larantuka
3. Bupati Flores Timur di Larantuka
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Yang bersangkutan.
6. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
KECAMATAN ADONARA BARAT  
W A I W A D A N**

*Jln. Trans Waiwadan – Buser, No. – Telp : – Fax: Kode Pos :86262*

**SURAT KETERANGAN / REKOMENDASI  
SELESAI PENELITIAN**

**Nomor : Kec. AB.070 / 676 / Pelum.Sos / 2018**

Dasar surat Kepala Desa Duwanur, Nomor Dnr.120 / 670 / IX / Pem / 2018, Tanggal 26 September 2018 ,  
Perihal Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian, maka Camat Adonara Barat dengan ini  
menerangkan :

Nama : **IDA ROHANA**  
NIM : 90100114119  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Lokasi Penelitian : Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur  
Lama Penelitian : 2 ( Dua ) Minggu

Adalah benar – benar Mahasiswa yang telah menyelesaikan penelitian di Desa Duwanur  
Kecamatan Adonara Barat dengan judul “ **SISTEM NERANG ( GADAI ) DALAM PERSPEKTIF ISLAM DI  
DESA DUWANUR KECAMATAN ADONARA BARAT KABUPATEN FLORES TIMUR** ”.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan Kepada yang bersangkutan untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Waiwadan, 26 September 2018

Camat Adonara Barat,

**WILHELMUS WISOK MANGU, SH**

Pembina Tk. I

NIP. 19660422 199312 1 002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Tembusan :

1. Bupati Flores Timur di Lantuka.
2. Kepala Badan KESBANGPOL Kabupaten Flores Timur di Lantuka.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Alauddin Makassar di Makassar.



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan Ile Nepo Telp. ( 0383 ) 21014, Fax ( 0383 ) 21994  
**L A R A N T U K A - 86218**

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

**NOMOR : BKBP.070 / 247 / Sekret / 2018**

Membaca : Surat Camat Adonara Barat Kabupaten Flores Timur, Nomor : Kec. AB. 070/676/Pelum.Sos/2018, Tanggal : 28 September 2018. Perihal : Surat Keterangan Selesai Penelitian.

Memperhatikan : Surat Keterangan / Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Flores Timur Nomor : BKBP.070/244/Sekret/2018, Tanggal : 10 September 2018.

Menerangkan :

Nama : **IDA ROHANA**

NIM : **90100114119**

Pekerjaan : **Mahasiswa.**

1. Telah selesai mengadakan Penelitian di Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur, dengan Judul : **"SISTEM NERANG (GADAI) DALAM PERSPEKTIF ISLAM DI DESA DUWANUR KECAMATAN ADONARA BARAT KABUPATEN FLORES TIMUR"**.
2. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Larantuka, 11 Oktober 2018

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Flores Timur,

**ANDREAS KEWA AMAN SH**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19641110 199303 1 016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALAUDDIN**  
**M A K A S S A R**

Tembusan :

1. Bupati Flores Timur, di Larantuka (sebagai laporan).
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Univ. Islam Negeri Alauddin Makassar, di Makassar.

## RIWAYAT HIDUP



Ida Rohana, lahir di Uwelolu, Desa Uwelolu Kecamatan Toili Barat Kabupaten Luwuk Banggai pada tanggal 13 Januari 1995. Penulis adalah anak ketiga dari tiga bersaudara yang merupakan buah cinta dari Sahman dan Hayati. Penulis menempuh pendidikan pertama di SD Inpres Kabuyu tahun 2001 dan lulus pada tahun 2007. Penulis melanjutkan pendidikan di Mts Bakti Persada dan lulus pada tahun 2011 setelah itu melanjutkan pendidikan MA Darul Ulum Toili dan akhirnya selesai pada tahun 2014. Setelah berhasil menyelesaikan pendidikan di SMAN 1 Anggeraja, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi yakni Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis mengambil program Strata 1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam.

Tahun 2014 sampai tahun 2018 telah berkarya dengan judul “Sistem *Gerang* (gadai) Dalam Perspektif Islam di Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur”.